

A photograph of a traditional Indonesian puppet show (wayang kulit) is the background. A red scalloped banner hangs at the top. In the center, a puppet with a black and gold mask and a black body is visible. To its right, a large, ornate, golden and colorful puppet head is partially visible. The scene is set against a plain white wall.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PERSPEKTI KEARIFAN LOKAL BERWAWASAN GLOBAL

Dr. Deny Setiawan., M.Si
Jamaludin., S.Pd., M.Pd.
Fazli Rachman., S.Pd., M.Pd.
Drs. Halking., M.Si.

PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

**PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL
BERWAWASAN GLOBAL**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

**PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL
BERWAWASAN GLOBAL**

Dr. Deny Setiawan., M.Si
Jamaludin., S.Pd., M.Pd.
Fazli Rachman., S.Pd., M.Pd
Drs. Halking, M.Si.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL BERWAWASAN GLOBAL

Penulis

Dr. Deny Setiawan., M.Si

Jamaludin., S.Pd., M.Pd.

Fazli Rachman., S.Pd., M.Pd

Drs. Halking., M.Si.

Editor

Jamaludin, S.Pd., M.Pd.

Hikmawan Syahputra., S.I.P., M.A.

Penata Letak

Ananda Rizalni., S.Pd.

Desain Sampul

Hikmawan Syahputra., S.I.P., M.A

Penerbit

CV. Format Publishing

Alamat Editor

Kompleks Griya Sei Rotan Syakinah Blok 5

Jalan Sugeng, Dusun IX, Desa Sei- Rotan- Percut Sei Tuan,

Deli Serdang-Sumatera Utara

Email : format.publishing@gmail.com

Website: www.formatpublishing.id

Member IKAPI (No.039/SUT/2020)

ISBN : 978-602-7543-86-7

E-ISBN : 978-602-7543-87-4 (PDF)

First Printing, Oktober 2022

Jumlah halaman, x + 134 hlm

*Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk
dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vii
PRAKATA	ix

BAB I

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PENTINGNYA KEARIFAN LOKAL DI ERA GLOBAL	1
A. Pendahuluan	1
C. Komponen Pendidikan Kewarganegaraan di Era Global	9
D. Pendidikan Kewarganegaraan Global di Indonesia dengan Mengangkat Kearifan Lokal	23
E. Penutup	31
DAFTAR PUSTAKA	33

BAB II

KEARIFAN LOKAL MEMBANGUN MENTAL GLOBAL	37
A. Pendahuluan	37
B. Kearifan Lokal Membangun Mental Global	39
C. Ragam Kearifan Lokal	44
D. Penutup	51
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB III

DESAIN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERORIENTASI KEARIFAN LOKAL _____	55
A. Pendahuluan _____	55
B. Materi Muatan Berbasis Kearifan Lokal _____	58
C. Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal _____	62
D. Penutup _____	77
DAFTAR PUSTAKA _____	79

BAB IV

“PROJECT CITIZEN” DENGAN MEMANFAATKAN NILAI- NILAI KEARIFAN LOKAL _____	85
A. Pendahuluan _____	85
B. Sejarah Perkembangan, Dasar Pemikiran, dan Tujuan Project Citizen _____	85
C. Langkah-langkah Penyusunan <i>Project Citizen</i> _____	89
D. <i>Project Citizen</i> Berbasis Kearifan Lokal _____	108
E. Penilaian Praktik <i>Project Citizen</i> _____	113
F. Penutup _____	124
DAFTAR PUSTAKA _____	125
GLOSARIUM _____	127
INDEKS _____	129
TENTANG PENULIS _____	131

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Penguasa langit dan bumi, yang dengan kuasa dan izin-Nya menjadikan kita makhluk berdaya, beradab dan bermartabat. Semoga penulis dan para pembaca semua dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan-Nya.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal Perspektif Global yang ditulis oleh Dr. Deny Setiawan., M.Si, Jamaludin., S.Pd., M.Pd., Fazli Rachman., S.Pd., M.Pd dan Drs. Halking., M.Si. ini sebenarnya ingin menceritakan dan memberikan pemahaman kepada para pembaca terkhusus kepada pelajar atau mahasiswa bahwa pendidikan kewarganegaraan yang mampu bersaing, tetap eksis dan memiliki nilai tambah di tengah pusaran global adalah pendidikan kewarganegaraan yang masih mempertahankan, memanfaatkan dan memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri. Kearifan lokal bukan berarti sederhana, terbelakang atau ketinggalan zaman, namun dengan pengelolaan dan manajemen yang matang ia akan mampu mewarnai dan menyemai nilai-nilai kemajuan, bahkan bisa menopang peradaban itu sendiri.

Nilai-nilai kearifan lokal adalah sebuah identitas dan jati diri bangsa yang selanjutnya dapat menjadi pondasi berkemanusiaan, berkeilmuan dan pembangunan yang merupakan titik episentrum bagi tonggak peradaban secara universal. Nilai-nilai gotong royong, keramah-tamahan, tenggang rasa, kesederajatan, persaudaraan, silaturahmi, kebersamaan, toleransi, saling menghormati, adalah modal

pembelajaran kewarganegaraan yang mungkin tidak dimiliki oleh semua bangsa, untuk selanjutnya dapat dibangun sebagai motor penggerak peradaban dalam berkehidupan di era post-industrial saat ini.

Penulis secara berturut-turut menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kearifan lokal bagi pendidikan kewarganegaraan di era global, menjelaskan tentang bagaimana kearifan lokal tersebut mampu membangun mental global, diulas pula tentang bagaimana mendesain pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi kearifan lokal itu, dan terakhir adalah olahan *project citizen* dengan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran.

Akhirnya, kami ucapkan selamat kepada para penulis terhadap terbitnya buku ini, semoga dapat diterima secara luas dan terbuka, serta sajian dalam buku ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan niat yang tulus, semoga buku ini ini dapat menjadi amal jariyah bagi diri penulis. *Aamin.*

Medan, 11 Oktober 2022

Editor

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal Perspektif Global dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Keberadaan buku ajar memiliki peran yang strategis dalam proses pembelajaran. Melalui bahan ajar, mahasiswa dapat secara mandiri mampu belajar, berefleksi, berinteraksi, dan bahkan menilai sendiri proses dan hasil belajarnya. Guna menciptakan proses pembelajaran yang efektif tersebut, maka buku ajar ini diadakan sebagai pegangan dan salah satu sumber belajar bagi mahasiswa, baik untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Kewarganegaraan maupun untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi, khususnya pada Jurusan atau Program Studi PPKn.

Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal Perspektif Global merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tim penulis dengan mencakup beberapa kajian: Bab I. PKN dan Pentingnya Kearifan Lokal di Era Global; Bab II. Kearifan Lokal Membangun Mental Global; Bab III. Desain Pembelajaran PKN Berorientasi Kearifan Lokal; Bab IV. Project Citizen Dengan Memanfaatkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal.

Segala upaya telah dilakukan oleh penulis untuk mewujudkan buku ajar ini dengan baik sebagai penuntun bagi para pembaca dan mahasiswa dalam menambah wawasan keilmuannya mengenai Pendidikan Kewarga-

negara (Perspektif kearifan lokal berwawasan global). Namun demikian, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan bahan ajar ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sebagai masukan dalam melakukan perbaikan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap, semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Medan, 11 Oktober 2022

Penulis

BAB I

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PENTINGNYA KEARIFAN LOKAL DI ERA GLOBAL



A. Pendahuluan

Pada masa transisi saat ini, dimana proses perjalanan bangsa sedang menuju masyarakat madani (*civil society*), Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di persekolahan dipandang perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang tengah berubah di era global. Proses pembangunan karakter bangsa (*national character building*) yang sejak jaman kemerdekaan telah terbangun, perlu direvitalisasi agar sesuai dengan isi pesan konstitusi.

Proses revitalisasi terhadap *national character building* yang dimaksud saat ini, diarahkan pada penciptaan tatanan masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi sebagai titik sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila. Berangkat dari pemikiran inilah, Pendidikan Kewarganegaraan di era reformasi harus dapat melakukan pergeseran paradigmanya dari yang bersifat feodalistik ke arah paradigma baru yang menunjukkan *New Indonesian Civic Education*.

Sadar akan tuntutan dan kebutuhan di atas, pemerintah telah merumuskan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara umum, baik untuk pendidikan dasar maupun menengah melalui pembekalan kompetensi dasar pada peserta didik dalam hal: (1) berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menangani isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (3) pembentukan diri yang didasarkan pada karakter-karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis (Depdiknas, 2003).

Ditambahkan oleh Winataputra (2002) dan Winarno (2006), bahwa tugas Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma barunya diarahkan pada pengembangan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga fungsi pokok, yakni: (1) mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), (2) membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan (3) mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk *a good citizenship*, bukan hanya dalam dimensi rasional yang selama ini terjebak dalam budaya belajar verbalistik tetapi juga meliputi dimensi spiritual, emosional, dan sosial, sehingga paradigma baru yang dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan akan bercirikan multidimensional.

Namun demikian untuk menuju *New Indonesian Civic Education*, disadari masih banyak kelemahan dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan, paling tidak

terdiri atas kelemahan pokok, seperti: (1) masih bersifat indoktrinatif dan terlalu menonjolkan moral behavioristik; (2) terjadi kesenjangan antara materi pelajaran dengan *basic* keilmuan dari kewarganegaraan; (3) penekanannya pada pembentukan warga negara yang “loyalitas”; dan (4) kurang mengembangkan kehidupan demokrasi yang partisipatif.

Hal ini juga dikemukakan oleh Wahab (1999), beberapa kelemahan yang ada pada Pendidikan Kewarganegaraan di masa yang lalu, antara lain: (1) terlalu menekankan pada aspek nilai moral belaka, dan menempatkan siswa sebagai obyek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu; (2) kurang diarahkan pada pemahaman struktur, proses, dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; (3) pada umumnya bersifat dogmatis dan relatif; (4) berorientasi kepada kepentingan rezim yang berkuasa.

Menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada, diusulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan baru, sebagai tujuan utamanya, hendaknya dapat mengembangkan kompetensi warga negara (*civic competence*), akhlak warga negara yang diinginkan (*desirable personal qualities* atau *civic virtue*) dan budaya warga negara (*civic culture*), serta nilai dan kepercayaan terhadap demokrasi (*democratic values and beliefs*) menuju terbentuknya kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Untuk itu Winataputra (2002) lebih lanjut mengusulkan, upaya pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di masa yang akan datang hendaknya: (1) memiliki konsistensi antara tujuan idealnya dengan struktur program kurikulumnya, yang mengacu pada misi dan fungsi pembentukan kepribadian warga negara yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; (2) seimbang antara pengembangan nilai moral dengan pemahaman struktur, proses dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; (3) menerapkan pendekatan pedagogis dan metodologis yang tidak bernuansa dogmatis-indoktrinatif, melainkan menumbuhkembangkan budaya berfikir kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif; dan (4) terintegrasi dengan konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budayanya.

Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di masa depan membutuhkan sebuah paradigma baru sebagai konsekuensi tuntutan globalisasi dan proses reformasi ke arah "*New Indonesian Civic Education*". Reformasi untuk membangun paradigma baru ini, dimulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian dapat bersinergi secara fungsional, bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan juga dalam kehidupan

bermasyarakat di era global. Pada satu sisi, mahasiswa sebagai warga negara dibekali dengan sejumlah kompetensi untuk dapat berdaya saing di era global. Namun pada sisi yang lain, kepemilikan nilai-nilai (kearifan lokal) tetap ditanamkan sebagai jati diri kebangsaannya.

B. Kecenderungan Global dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Sejak tahun 1980 Pendidikan Kewarganegaraan dalam perkembangannya mulai diwarnai oleh pentingnya nilai-nilai demokrasi. Bahkan memasuki tahun 1990, teori dan praktek demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan menjadi tren sebagai kecenderungan global hampir di semua negara. Kondisi ini menunjukkan masyarakat di berbagai negara di belahan dunia mulai memahami pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai realisasinya prinsip-prinsip demokrasi mulai disosialisasikan melalui suatu wadah pendidikan, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan yang diharapkan mampu mengarahkan dan mendidik warga negara agar dapat berperan aktif dalam kehidupan demokrasi dan jalannya pemerintahan.

John J. Patrick (Quiqley, 2000: 4-7) menuliskan kecenderungan perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan secara global saat ini sebagai suatu figur kajian yang menampilkan dirinya sebagai:

1. Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki keterkaitan secara fungsional antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat

(*civic skill*) dan berkembangnya nilai-nilai kebajikan dalam masyarakat (*civic virtue*). Pengetahuan kewarganegaraan yang dimaksud menyangkut prinsip-prinsip dan teori demokrasi, jalannya pemerintahan yang demokratis dan perilaku demokratis masyarakat serta perbandingan nilai demokrasi antar negara. Pemahaman ini kemudian akan mengarahkan peserta didik sebagai warga negara untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan warga negara, yang kemudian didukung oleh nilai kebajikan dalam masyarakat seperti saling menghargai, kepribadian, disiplin diri, toleransi, patriotisme dan tanggung jawab.

2. Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki pola pembelajaran sistematis mengenai konsep-konsep utama. Konsep utama dalam pola pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menyangkut pemerintahan demokratis dan hak-kewajiban warga negara serta informasi tentang bentuk dan tugas lembaga politik.
3. Pola pembelajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan melalui upaya mengaplikasikan konsep-konsep utama dengan pendekatan analisis berbagai kasus yang berkembang dalam kehidupan bernegara.
4. Pengembangan ketrampilan dan kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk aktif dalam membuat keputusan. Studi kasus dan legal isu (*controversial issue*) dijadikan pendekatan untuk

mendorong dan melatih peserta didik sebagai warga negara agar mampu membuat keputusan.

5. Analisis perbandingan internasional tentang pemerintahan dan kewarganegaraan. Melalui analisis ini pola pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan, agar peserta didik dapat mempelajari dan kemudian membandingkan demokrasi antar negara.
6. Pengembangan ketrampilan partisipatoris dan kebajikan warga negara melalui kegiatan-kegiatan belajar. Pembelajaran kooperatif dalam kelompok kecil dapat mengarahkan siswa untuk memahami dan melaksanakan ketrampilan memimpin, resolusi konflik, kompromi, negosiasi, kritik membangun, toleransi, sivilisasi dan kepercayaan.
7. Penggunaan buku sumber dan pemanfaatan berbagai sumber di dalam proses belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan.
8. Mempelajari secara aktif pengetahuan, ketrampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara (*civic virtue*).
9. Menghubungkan antara isi dan proses dalam pembelajaran Kewarganegaraan dengan mensinergiskan pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara secara fungsional.

Berdasarkan sembilan kecenderungan Pendidikan Kewarganegaraan di era global di atas, diharapkan *output* dari Pendidikan Kewarganegaraan dapat menampilkan sosok pengetahuan warga negara (*a body of civic knowledge*) yang integratif dari hasil sinergi pengetahuan, keterampilan, dan *civic virtue* secara fungsional. Hal ini berarti dapat diasumsikan bahwa jika peserta didik dapat

berpikir secara kritis dan bertindak secara efektif, serta pandai dalam menjawab berbagai isu-isu sosial kemasyarakatan (*virtuously response to a public issue*), maka mereka harus dapat memahami permasalahan-permasalahan, sumber isu dan alternatif jawaban terhadap isu, serta kemungkinan akibat dari jawaban-jawaban terhadap permasalahan/isu tersebut. Semua ini tentu didasari oleh sosok pengetahuan warga negara (*a body of civic knowledge*) yang integratif.

Perkembangan di atas merupakan kecenderungan yang terjadi dalam Pendidikan Kewarganegaraan dewasa ini. Di samping kecenderungan global Pendidikan Kewarganegaraan untuk demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan juga dipengaruhi perkembangan global lainnya. Menurut Wahab (1999) perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di era global telah terjadi pergeseran dari penekanan pada kebenaran yang bersifat *monovision* kepada *multivision*. Pendidikan Kewarganegaraan dengan sifatnya yang *multivision* akan memungkinkan lahirnya perbedaan, pilihan alternatif dalam berbagai aspek kehidupan warga negara, tumbuhnya rasa kebebasan dan persamaan dalam konteks hukum yang berkeadilan, serta penghargaan terhadap hak-hak sipil warga negara.

Pengaruh kecenderungan global lainnya yang bersifat umum meliputi: "*the global economy*", "*technology and communications*" dan "*population and environment*". Kecenderungan-kecenderungan global ini secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi konsep dan

pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan secara multi dimensional di abad 21 Cogan (1998: 11).

Fakta ini sekaligus menggambarkan bahwa di dalam Pendidikan Kewarganegaraan, persoalan kehidupan warga negara dalam sistem nilai demokrasi telah mengalami *globalizing* (Patrick, 2000: 1). Hal ini berarti di dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan, kajian isi atau materi Pendidikan Kewarganegaraan, tidak hanya berorientasi dalam perspektif lokal dan nasional, namun harus menyesuaikan dengan perkembangan global yang tengah mengalir membawa nilai-nilai baru, seperti demokrasi dan *civil society*.

C. Komponen Pendidikan Kewarganegaraan di Era Global

Hakekat dari upaya pemberdayaan warga negara adalah upaya pembangunan sumber daya manusia, sehingga cara yang dipandang paling strategis adalah melalui proses pendidikan. Untuk itulah, alternatif paradigma pendidikan yang seharusnya dianut pada era reformasi adalah “pendidikan untuk pemberdayaan.” Dalam sistem pendidikan nasional, tanpa mengesampingkan mata pelajaran yang lain, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentu saja harus lebih mampu berfungsi secara efektif dalam pemberdayaan warga negara, sebab objek material mata pelajaran ini terutama adalah mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dari sinilah perlu dirumuskan visi, misi, dan peran Pendidikan Kewarganegaraan baru. Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma lama jelas tidak dapat berfungsi sebagai

sarana pemberdayaan warga negara, bahkan sebaliknya justru dapat menjadikan warga negara semakin tidak berdaya (Cholisin, 2004).

Paradigma baru yang diusulkan dalam Pendidikan kewarganegaraan haruslah berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Print et.al (1999: 25) mengemukakan, *civic education is necessary for the building and consolidation of a democratic society*. Inilah visi Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dipahami oleh pendidik, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Kedudukan warga negara yang ditempatkan pada posisi yang lemah dan pasif, seperti pada masa-masa yang lalu, harus diubah pada posisi yang kuat dan partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis semestinya tidak bersifat *top down*, melainkan lebih bersifat *bottom up*.

Secara klasik sering dikemukakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*). Akan tetapi pengertian “warga negara yang baik” itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa “revolusioner”, anti imperialisme, kolonialisme, dan neo kolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga

negara yang Pancasilais, manusia pembangunan dan sebagainya.

Sejalan dengan visi Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, misi mata pelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Agar peserta didik memiliki kompetensi seperti itu, diperlukan seperangkat pengetahuan dan keterampilan, serta watak yang mendukung pengembangan kemampuan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, (Branson, 1999; Suryadi dan Somardi, 2000: 5) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada tiga komponen pengembangan, yaitu (1) *civic knowledge*, (2) *civic skills*, dan (3) *civic disposition*. Dalam prosesnya, tiga komponen tersebut bersinergi secara fungsional, sehingga diharapkan dapat menghasilkan “warga negara yang baik” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan memperhatikan tiga komponen di atas dan berorientasi pada sistem kehidupan global, maka materi Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian warga negara, tidak saja fungsional dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam era kehidupan global.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan materi atau substansi yang harus diketahui warga negara. Komponen pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur

dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, dan bernegara. Setiap orang perlu memiliki kesempatan untuk mempelajari pemerintahan dan masyarakat madani. Pembekalan materi tersebut akan membantu siswa membuat pertimbangan yang luas dan penuh nalar tentang hakekat kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berpemerintahan, dan mengapa politik dan pemerintahan itu diperlukan; tujuan pemerintahan; ciri-ciri penting pemerintahan (terbatas dan tidak terbatas); hakekat dan tujuan konstitusi; dan cara-cara alternatif mengorganisasikan pemerintahan.

Pembelajaran materi ini hendaknya meningkatkan pemahaman yang lebih banyak tentang hakekat dan pentingnya masyarakat madani atau jaringan kompleks asosiasi-asosiasi politik, sosial, dan ekonomi yang dibentuk secara bebas dan sukarela. Masyarakat madani bukan hanya mencegah penyelewengan atau pemusatan kekuasaan yang berlebihan oleh pemerintah; organisasi-organisasi masyarakat madani berfungsi sebagai laboratorium publik tempat warga negara belajar demokrasi dengan cara mempraktikkannya secara langsung (Suryadi dan Somardi, 2000).

Sementara keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup

intellectual skills (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi).

Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan/mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. Sedangkan keterampilan partisipasi dalam demokrasi akan dapat dicapai apabila semua orang tanpa kecuali ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan. Dengan kata lain cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya.

Pengembangan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dalam praktek pembelajaran kewarganegaraan, dijabarkan secara rinci oleh *Center for Civic Education* (1994: 127-135) seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Keterampilan Kewarganegaraan

Keterampilan Intelektual	Keterampilan Partisipasi
1. Mengidentifikasi (menandai/menunjukkan) dibedakan menjadi keterampilan: <ul style="list-style-type: none">- Membedakan;- Mengelompokkan/ mengklasifikasikan;	1. Berinteraksi (termasuk berkamu-nikasi tentunya) terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik, yang termasuk dalam

Keterampilan Intelektual	Keterampilan Partisipasi
<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan bahwa sesuatu itu asli. <p>2. Menggambarkan (memberikan uraian/ilustrasi), misalnya tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses; - Lembaga; - Fungsi; - Alat; - Tujuan; - Kualitas. <p>3. Menjelaskan (mengklasifikasi/ menafsirkan), misalnya tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebab-sebab terjadinya sesuatu peristiwa; - Makna dan pentingnya peristiwa atau ide; - Alasan bertindak. <p>4. Menganalisis, misalnya tentang kemampuan menguraikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur-unsur atau komponen-komponen ide (gagasan), proses politik, institusi-institusi; - Konsekuensi dari ide, proses politik, institusi-institusi; 	<p>keterampilan ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun; - Menjelaskan artikulasi kepentingan; - Membangun koalisi, negoisasi, kompromi; - Mengelola konflik secara damai; - Mencari konsensus. <p>2. Memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik, yang termasuk keterampilan ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar, TV, dll untuk mengetahui persoalan-persoalan publik; - Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok-kelompok

Keterampilan Intelektual	Keterampilan Partisipasi
<ul style="list-style-type: none"> - Memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan, mana yang merupakan fakta dan pendapat, mana yang merupakan tanggung jawab pribadi dan mana yang merupakan tanggung jawab publik. <p>5. Mengevaluasi pendapat/posisi: menggunakan kriteria/standar untuk membuat keputusan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan dan kelemahan isu/ pendapat; - Menciptakan pendapat baru. <p>6. Mengambil pendapat/posisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil seleksi berbagai posisi; - Membuat pilihan baru. <p>7. Mempertahankan pendapat/ posisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang 	<p>kepentingan, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya dengan cara menghadiri berbagai pertemuan publik seperti: pertemuan organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa/ BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.</p> <p>3. Mempengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal maupun informal, yang termasuk keterampilan ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan simulasi tentang kegiatan: kampanye, pemilu, dengar pendapat di DPR/DPRD, pertemuan wali kota, lobby, peradilan; - Memberikan suara dalam suatu pemilihan; - Membuat petisi;

Keterampilan Intelektual	Keterampilan Partisipasi
dipertahankan/diam bil/ dibela; - Merespons posisi yang tidak disepakati.	- Melakukan pembicaraan/ memberi kesaksian di hadapan lembaga publik; - Bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain; - Meminta atau menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu.

Sumber: Center for Civic Education. (1994).

Sedangkan komponen yang ketiga adalah *civic dispositions*. Disposisi kepribadian warga negara yang mendukung efektivitas politik individu, keberfungsian sistem politik yang sehat, martabat dan harga diri, serta kepentingan umum, adalah kepribadian warga negara yang menampilkan dirinya:

1. Menjadi anggota masyarakat yang mandiri. Disposisi ini meliputi kepatuhan secara suka rela terhadap standar perilaku yang dibebankan sendiri daripada memerlukan pembebanan dari kontrol luar, penerimaan tanggung jawab terhadap akibat-akibat dari perbuatan sendiri dan pemenuhan kewajiban moral dan hukum dari keanggotaan dalam masyarakat demokratis;

2. Memikul tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab untuk mengurus diri sendiri, menopang keluarga, merawat, mengurus, dan mendidik anak sendiri. Termasuk juga ke dalam disposisi ini adalah berwawasan tentang persoalan-persoalan publik, memberikan suara, membayar pajak, memberi pelayanan publik, dan memangku jabatan kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri;
3. Hormat terhadap harga diri dan martabat kemanusiaan. Menghormati orang lain berarti mendengarkan pandangan-pandangannya, berperilaku menurut cara yang santun, menghargai hak dan kepentingan sesama warga negara, dan mematuhi prinsip aturan mayoritas tetapi dengan menghormati hak minoritas yang berbeda pandangan dengannya;
4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kemasyarakatan menurut cara yang penuh pemikiran dan efektif. Disposisi ini menghendaki wawasan yang luas sebelum memberikan suara atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam wacana yang santun dan reflektif, dan memangku kepemimpinan jika sesuai. Disposisi ini pun menghendaki penilaian apakah dan kapankah kewajiban seseorang sebagai warga negara menghendaki bahwa keinginan dan kepentingan pribadi dikesampingkan demi kepentingan umum dan penilaian apakah dan kapankah kewajiban-kewajiban seseorang atau prinsip-prinsip konstitusi mewajibkan seseorang

untuk menolak harapan-harapan kewarganegaraan tertentu;

5. Meningkatkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat. Disposisi ini meliputi wawasan dan perhatian terhadap urusan-urusan publik, mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi, memantau kepatuhan para pemimpin politik dan lembaga publik terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi tersebut dan mengambil tindakan yang tepat jika mereka tidak mematuhi. Disposisi ini pun memberi kecenderungan warga negara untuk bekerja melalui cara-cara damai dan berdasar hukum, untuk mengubah peraturan hukum yang dianggap tidak bijak atau tidak adil (*Center for Civic Education, 1994*).

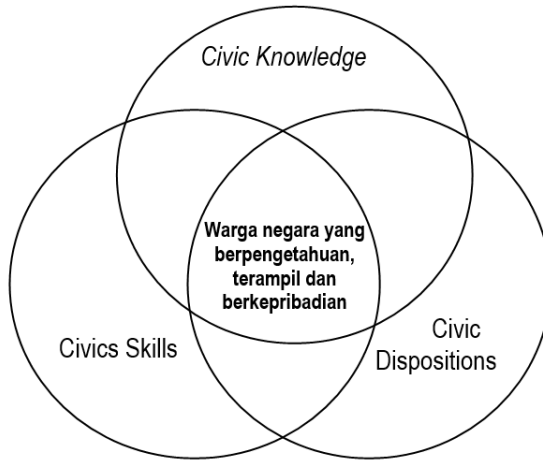
Berdasarkan paparan di atas, mengisyaratkan ketiga komponen dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu: *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*, dengan paradigma barunya, perlu dikembangkan lebih lanjut guna menghasilkan *a body of civic knowledge* yang dapat memenuhi harapan demokrasi dan *civil society*. Di Indonesia sendiri, Pendidikan Kewarganegaraan telah dikembangkan dengan memuat ketiga komponen tersebut yang secara garis besar meliputi:

- (1) Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), dikembangkan dengan mencakup bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non

pemerintahan, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik.

- (2) Dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik.
- (3) Dimensi watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas (Depdiknas, 2003).

Dalam implementasinya ketiga komponen tersebut, dikembangkan secara menggamit yang dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 1.1. *The Ideal Democratic Citizen* (CCE, 1994)

Dari tiga komponen di atas, kemudian dijabarkan ke dalam substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan, seperti di bawah ini:

Tabel 1.2.
Substansi Kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Topik Substansi Kajian	Uraian Materi Kajian
1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Hidup rukun dalam perbedaan; Cinta lingkungan; Kebangsaan sebagai bangsa Indonesia; Sumpah Pemuda; Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Partisipasi dalam pembelaan negara; Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keterbukaan dan jaminan keadilan.

2. Norma, Hukum, dan Peraturan	Tertib dalam kehidupan keluarga; Tertib di sekolah; Norma yang berlaku di masyarakat; Peraturan-peraturan daerah; Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Sistem hukum dan peradilan nasional; Hukum dan peradilan internasional.
3. Hak Asasi Manusia	Hak dan kewajiban anak; Hak dan kewajiban anggota masyarakat; Instrumen nasional dan internasional HAM; Pemajuan, dan penghormatan HAM.
4. Kebutuhan Warga Negara	Hidup gotong royong; Harga diri sebagai warga masyarakat; Kebebasan berorganisasi; Kemerdekaan mengeluarkan pendapat; Menghargai keputusan bersama; Prestasi diri; Persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara	Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi pertama; Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia; Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan Politik	Pemerintahan desa dan kecamatan; Pemerintahan daerah dan otonomi; Pemerintahan pusat; Demokrasi dan sistem politik; Budaya politik; Budaya demokrasi menuju masyarakat

	madani; Sistem pemeritahan; Pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila	Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara; Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara; Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi	Globalisasi di lingkungannya; Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi; Dampak globalisasi; Hubungan internasional dan internasional; dan Mengevaluasi globalisasi.

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Berdasarkan uraian di atas diperoleh gambaran tentang keragaman luasnya cakupan materi dan penataan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap aneh, sebab kurikulum pada dasarnya adalah suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan, standar materi mata pelajaran ini tidak sedemikian ketat, cukup fleksibel, bahkan mudah berubah. Indonesia sendiri mempunyai pengalaman mengenai berubah-ubahnya isi materi pelajaran ini, seiring dengan pergantian rezim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari sekian banyak mata pelajaran, tidak ada mata pelajaran yang perubahan materinya “sedinamis” mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun

demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru dalam restrukturisasi isi kurikulum harus mendasarkan pada standar kelayakan materi yang bersifat universal, yang *core* atau intinya relevan dan tidak bertentangan dengan sistem demokrasi di Indonesia.

Artinya bahwa restrukturisasi isi kurikulum PKn di Indonesia dalam dimensi global yang meliputi komponen: *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic values/dispositions*, bagaimanapun jangan terlepas dari “akar”nya dalam membentuk warga negara Indonesia yang demokratis, cerdas, dan religius. Hal ini sejalan dengan muatan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi yang seyogyanya menjadi isi dari PKn pada dasarnya diangkat dari pilar-pilar demokrasi konstitusional Indonesia (Sanusi, 1998) yang antara lain meliputi: demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan kecerdasan warga negara, demokrasi dengan adanya pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan “*rule of law*”, demokrasi dengan peradilan yang merdeka, demokrasi dengan kesejahteraan masyarakat, dan demokrasi dengan keadilan sosial.

D. Pendidikan Kewarganegaraan Global di Indonesia dengan Mengangkat Kearifan Lokal

Indonesia merupakan negara kepulauan yg memiliki sekitar 17.667 pulau. Di antara ribuan pulau yang terserak dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia, terdapat lebih dari 700 suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Dengan demikian, identitas bangsa Indonesia tidak

terlepas dari keberadaan bangsa Indonesia yang bhinneka. Oleh sebab itu, identitas bangsa Indonesia sangat terkait dengan identitas etnis yang merupakan batu bangunan fondasi bangsa Indonesia (Tilaar, 2007: XVI).

Terkait dengan identitas etnis, (Suhartini, 2009) menambahkan hampir sebagian besar etnis di negara ini memiliki aturan-aturan yang dikenal dengan istilah kearifan lokal. Pernyataan ini menunjukkan, masing-masing etnis dan suku di Indonesia memiliki kearifan lokalnya sendiri, yang sekaligus menggambarkan betapa kayanya Indonesia dalam kepemilikan kearifan lokal.

Suswandari (2017), menjelaskan kearifan lokal merupakan ungkapan budaya yang khas yang didalamnya terkandung tata nilai, etika, norma, aturan dan keterampilan suatu komunitas dalam memenuhi tantangan keberlanjutan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal, terbukti telah memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat lokal yang ada di seluruh nusantara, hidup penuh dengan keseimbangan dan kedamaian.

Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang telah mentradisi dan melembaga dijadikan sebagai pedoman hidup dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari budaya. Oleh karena itu, Kartawinata (2011) menyatakan kearifan lokal sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*) dapat dijadikan sebagai identitas kebudayaan nasional Indonesia.

Dalam perspektif etnopedagogi, nilai-nilai kearifan lokal dapat dijadikan sebagai sumber belajar (Pingge & Aingu, 2021). Etnopedagogi merupakan praktik pendidikan berbasis kearifan lokal dalam berbagai ranah, seperti kesehatan, seni, lingkungan hidup, pertanian, dan juga pemerintahan. Etnopedagogi merupakan cerminan pendidikan bermuatan lokal atau lebih dikenal dengan pendidikan atau pembelajaran berbasis kearifan lokal.

Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal (*local knowledge, local wisdom*) sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, kepercayaan, dan persepsi masyarakat ihwal dunia sekitar. Singkatnya, kearifan lokal adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan. Jadi, etnopedagogi merupakan istilah lain dari pendidikan berbasis kearifan lokal (Alwasilah, dkk., 2009).

Dapat disimpulkan bahwa etnopedagogi atau pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan pendidikan yang memanfaatkan keunggulan suatu daerah dari segi ekonomi, seni budaya, sumber daya manusia, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi serta lainnya ke dalam kurikulum sekolah yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik juga dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk persaingan global. Etnopedagogi atau pendidikan berbasis kearifan lokal menjadi praktik pendidikan yang memiliki hubungan tinggi bagi kecakapan hidup, bertumpu pada pemberdayaan

keterampilan dan potensi lokal masing-masing daerah. Dari konteks pendidikan ini, materi pelajaran harus memiliki makna, muatan dan relevansi tinggi terhadap pemberdayaan hidup peserta didik secara nyata berdasarkan kenyataan yang dihadapi.

Secara khusus, etnopedagogi atau pendidikan berbasis kearifan lokal memiliki tujuan, yakni:

- 1) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya;
- 2) mempunyai bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya;
- 3) mempunyai sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai luhur budaya setempat untuk menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Sedangkan manfaat etnopedagogi atau pendidikan berbasis kearifan loka, yaitu:

- 1) melahirkan generasi-generasi yang kompeten dan bermartabat;
- 2) merefleksikan nilai-nilai budaya;
- 3) membentuk karakter bangsa;
- 4) ikut berkontribusi demi terciptanya identitas budaya;
- 5) melestarikan budaya bangsa.

Namun secara umum, kearifan lokal memiliki ciri dan fungsinya yang sangat penting, yakni:

- 1) sebagai tanda identitas masyarakat;
- 2) sebagai perekat kohesi sosial;

- 3) sebagai pertumbuhan, keberadaan, dan perkembangan dari bawah ke atas dalam masyarakat, unsur budaya-budaya bukan unsur yang dipaksakan dari atas;
- 4) memberikan warna solidaritas bagi komunitas tertentu;
- 5) individu serta kelompok dapat diubah dengan menempatkannya pada landasan yang sama untuk mengubah mentalitas dan hubungan timbal balik mereka;
- 6) mampu mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, dan mekanisme bersama untuk mempertahankan diri dari kemungkinan terjadinya gangguan atau merusak solidaritas kelompok sebagai komunitas yang utuh dan terintegrasi.

Berdasar pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa sebagai identitas yang khas dan unik di suatu daerah atau tempat tertentu, kearifan lokal juga menjadi sebuah kekuatan khusus dalam mempertahankan nilai-nilai identitas dan solidaritas (Utari et al., 2016).

Namun seiring dengan perubahan jaman, era globalisasi yang membawa dampak terhadap maraknya nilai-nilai global seperti: kapitalistik, individualistik dan hedonistik telah menggeser nilai-nilai lokal dan semakin menjauhkan anak bangsa dari cara pandang kearifan lokalnya dan bahkan kehilangan jati diri (Latif, 2013). Fenomena masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh komponen bangsa, tak terkecuali bagi institusi pendidikan. Melalui institusi ini, para generasi penerus

bangsa sudah sepatutnya di era global untuk kembali memiliki nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dengan demikian diperlukan adanya kepedulian dari para elitis, para pengambil keputusan dan pakar pendidikan untuk duduk bersama merumuskan desain pendidikan nasional yang dapat mengakomodir nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat diangkat dan dijadikan sebagai modal budaya sebagai salah satu pembekalan kompetensi bagi generasi bangsa dalam bersaing di era global.

Dalam hal ini Atmodjo (1986:37) menyatakan kearifan lokal dapat dijadikan sebagai media kemampuan bangsa dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing yang datang untuk dilakukan secara selektif. Ditambahkan oleh Yunus (2014: 37), kearifan lokal pada suatu masyarakat mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa dalam menghadapi arus globalisasi.

Memasuki 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, *nation and character building* sebagai komitmen awal pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan, belum membuahkan hasil yang optimal. Berbagai permasalahan yang melanda bangsa belakangan ini di era global, ditengarai telah menjauhkan generasi bangsa dari karakter yang baik (Lickona, 1991). Bahkan yang mengkhawatirkan dalam kehidupan generasi muda saat ini di era global, fenomena westernisasi seakan memperlihatkan anak bangsa mulai tercerabut dari akar kebangsaannya, sikap hidup hedonisme, gaya hidup bebas,

pornografi, candu narkoba, tawuran, *bullying*, *hoaks*, bahkan radikalisme.

Faktualitas karakter kebangsaan paska-reformasi yang kian memprihatinkan ini, sudah selayaknya bagi seluruh komponen bangsa dan institusi yang ada, untuk komitmen menempatkan *nation and character building* sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Eksistensi institusi termasuk institusi pendidikan, sangat dibutuhkan dan mempunyai peran penting sebagai wadah dalam penguatan karakter kebangsaan (Setiawan dan Sitompul, 2017). Oleh karena itu, dalam kerangka *nation character building*, sudah sepatutnya institusi pendidikan di era global dapat berperan sebagai wadah dalam pembentukan karakter kebangsaan melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal.

Sekaitan dengan hal tersebut, tanpa mengucilkan peran dari bidang studi lain, Pendidikan Kewarganegaraan yang sarat dengan muatan nilai dapat dikembangkan sebagai program pendidikan nilai, dengan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai program sistemik penguatan karakter kebangsaan. Gagasan ini muncul dilatarbelakangi oleh fakta belum optimalnya Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang secara kontekstual dapat memanfaatkan kearifan lokal kepada para mahasiswanya dalam pembangunan karakter kebangsaan, yang sekaligus membekali kompetensi lulusan dengan nilai-nilai kearifan lokal-nya tersebut sebagai modal budaya untuk dapat berdaya saing di era global.

Berdasarkan pemikiran ini, Pendidikan Kewarganegaraan di era global, didesain ulang dengan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai program sistemik penguatan karakter kebangsaan. Melalui desain ini, mahasiswa dibekali kemampuan untuk dapat mengembangkan kompetensi warga negara (*civic competence*), akhlak warga negara yang dapat diandalkan (*desirable personal qualities*), budaya warga negara (*civic culture*) serta nilai dan kepercayaan terhadap demokrasi (*democratic values and beliefs*) menuju terbentuknya kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Winataputra, 2009).

Ditambahkan oleh John J. Patrick (Quiqley, 2000: 4-7), kompetensi warga negara di era global selain adanya kepemilikan *civic knowledge* dan *civic skill*, perlu juga dibekali dengan kompetensi *civic virtue* yakni kepemilikan nilai nilai kebajikan yang berasal dari nilai luhur masyarakatnya, untuk dapat tampil sebagai warga negara global yang demokratis tanpa kehilangan jati diri kebangsaannya di era globalisasi yang sarat dengan perubahan dan persaingan.

Dengan demikian, desain pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di era global bermuatan kearifan lokal dikembangkan dengan tujuan pada penguatan kompetensi mahasiswa ke dalam tiga aspek, yakni; kemampuan dalam mengapresiasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam bentuk kearifan lokal sebagai identitas kebangsaannya; kemampuan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal untuk dijadikan sebagai modal budaya dalam memperkuat daya

saingnya di era global; dan kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai warga negara global yang bangga dengan nilai-nilai luhur budaya bangsanya.

E. Penutup

Globalisasi yang tengah bergulir membawa dampak baik positif maupun negatif dan memberi pengaruh kepada kaum muda dalam berkehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Fenomena gaya hidup individualistik, kapitalistik dan bahkan hedonistik di kalangan kaum muda, menunjukkan telah tergerusnya nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kearifan lokal kepada masyarakat modern, dapat dilakukan dengan menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui pendidikan formal dalam bentuk pembelajaran nilai-nilai kearifan lokal.

Pendidikan berbasis kearifan lokal bukanlah konsep baru, namun sudah ada dengan istilah yang dikenal dalam dunia pendidikan dengan nama etnopedagogi. Etnopedagogi adalah sebuah konsep pendidikan di mana pengetahuan atau kearifan lokal diakui sebagai sebuah fakta, sumber inovasi, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan dalam pembelajaran. Praktik pendidikan yang berdasarkan atas pengetahuan kearifan lokal telah berkembang dalam komunitas kehidupan masyarakat. Perkembangan pendidikan berbasis kearifan lokal dalam komunitas masyarakat ini, utamanya dilaksanakan sebagai alternatif untuk menghadapi pengaruh negatif globalisasi.

Nilai-nilai kearifan lokal dalam suatu budaya dapat dijadikan sumber belajar, terutama dalam hal ini, melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sarat dengan muatan nilai. Praktik Pendidikan Kewarganegaraan di era global yang selama ini telah berjalan dengan memuat komponen *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions*, perlu dikembangkan dengan penekanan pada *civic virtue* (nilai-nilai kebajikan). Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan di era global didesain dengan membekali peserta didik untuk memiliki kompetensi daya saing global. Namun pada sisi yang lain secara bersamaan, Pendidikan Kewarganegaraan tetap dikembangkan sebagai program pembentukan karakter dan penguatan identitas kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. C., & dkk. (2009). *Etnopedagogi Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru*. Kiblat Buku Utama.
- Atmodjo. (1986) *Pengertian Kearifan Lokal dan Relevansinya Dalam Modernisasi Dalam Ayatrohaedi Penyunting (1986) Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Branson, Margaret S., dkk. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKIS.
- Center for Civic Education. 1994. *National Standards for Civics and Government*. Calabasas, CA: CCE.
- Cholisin. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan Rekonstruksi Paradigama Lama Kewarganegaraam , Menuju Indonesia Baru*. Jurnal Cakrawala Pendidikan Tahun XIX 2004. Jogyakarta : CPN UNY P2 38 :245Damanhuri.
2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Serang: Untirta Press.
- Cogan, J.J. 1998. *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Cogan Page.
- Depdiknas. 2003. *Mata Pelajaran Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Kartawinata, Ade. M. (2011). Merentas Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi dan Tantangan Pelestarian, dalam Nasruddin (2011). *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan

Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI.

Latif, Y. (2013). "Globalisasi, Ancaman Ideologis dan Antisipasi Pancasila", dalam Arifinsyah: *Multikultural Kebangsaan Kajian Terhadap Kearifan Lokal Sumatera Utara*. Medan: Perdana Mulya Sarana.

Lickona, T. 1991. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantan Books.

Patrick, John J. 1999. "Concepts, at the Core Education for Democratic Citizenship," dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick (eds.), *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship*. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, pp. 1-40.

_____. 2000. "Defining, Delivering, and Defending a Common Education for Citizenship in a Democracy," dalam John J. Patrick, Gregory E. Hamot, dan Robert S. Leming (eds.), *Civic Learning in Teacher Education*. Vol 2, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, pp. 5-23.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006
Tentang Standari Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pingge, H. D., & Aingu, R. M. (2021). Studi Etnopedagogi Nilai-Nilai Sila Pancasila pada Budaya Lokal Masyarakat Adat Sumba. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 3(1), 16–22. <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v3i1.770>.

- Print, Murray, et.al. 1999. *Civic Education for Civil Society*. London: Asian Academic Press.
- Quiqley, C. N. 2000. *Global Trends in Civic Eduction*. Calabahas: CCE.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Sanusi, A. 1998. *Memberdayakan Masyarakat Dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi*. Bandung: Panitia Semlok PPKn IKIP Bandung.
- Setiawan, D dan Sitompul, H. "The Real Development of Authentic Assessment Based on Characters of Primary Students". *Medwell Journal*, Vol. 12, Issue 6, 2017. pp. 40-51.
- Suhartini, 2009. *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Tersedia*:<http://stan.uny.ac.id> (25 Mei 2015).
- Suryadi, A & Somardi. 2000. *Pemikiran Ke Arah Rekayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan*. (Makalah). Bandung: CICODE.
- Suswandari, 2017. "Lokal History of Jakarta and Multicultural Attitude (Historial Local Study of Betawi Ethic). *Journal of Education, Teaching and Learning*.2 (1), pp. 33-41.
- Tilaar, H.A.R., (2007). *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia: Stretegi Reformasi Pendidikan Nasional*.Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Utari, U., Degeng, I. N. S., & Akbar, S. (2016). Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*,

1(1), 39–44. <http://journal.um.ac.id/index.php/jtppips/article/view/5861/2413>.

Yunus, R. (2014). *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula*. Yogyakarta: Deepublish.

Wahab, A. A. 1999. *Pengembangan Konsep dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Baru Indonesia Bagi Terbinanya Warga Negara Multidimensional*. (Makalah). Bandung: CISED. Winataputra, U. S. (2009). *Materi dan Pembelajaran IPS SD*. Universitas Terbuka.

Wahab, A & Sapriya. 2012. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, D. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara

Winataputra, U.S. 2002. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam*. (Laporan). Jakarta: STAIN.

_____, (2009). *Materi dan Pembelajaran IPS SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.

BAB II

KEARIFAN LOKAL MEMBANGUN MENTAL GLOBAL



A. Pendahuluan

Lahirnya kearifan lokal pada kelompok masyarakat dimulai dari sistem nilai yang berlaku pada entitas masyarakat tersebut. Maka setiap kelompok masyarakat memiliki tatanan sosial kultural yang dijunjung tinggi sebagai pedoman hidup maupun pandangan hidup. Sistem nilai mengupayakan penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang beradab oleh karenanya kearifan lokal merupakan konstruksi budaya.

Indonesia dalam keberagaman budaya menunjukkan identitas-identitas yang beragam dan kompleks karena setiap masyarakat memiliki kearifan lokal yang berbeda pula. Mengkaji kekayaan keberagaman kearifan lokal di Indonesia yang mengarah pada jati diri atau nilai-nilai karakter akan tampak pada penerapan dalam kehidupan masyarakat yang nyata dan berkesinambungan. Konsistennya nilai-nilai tersebut sebagai tonggak budaya berupaya membentengi diri dari pengaruh pergaulan lintas budaya, sebut saja tantangan dan ancaman tergerusnya jati diri dalam dimensi perubahan zaman yang terus bergulir.

Kearifan lokal dalam pandangan Akhmar dan Syarifudin, menjelaskan bahwa kearifan lokal dimaknai sebagai tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal secara arif dan bijaksana baik dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan tempat hidupnya. Lebih spesifik kearifan lokal bagian dari kaidah nilai yang disepakati dan dilaksanakan dalam tatanan sosial kultural yang diyakini kebenarannya sehingga menjadi pedoman hidup dalam bersikap, berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari (way of life) (Akhmar, 2007).

Komitmennya nilai-nilai kearifan lokal dapat dilihat dari warisan edukasi yang diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan dari masa ke masa, baik itu dimulai hubungan interaksi dan komunikasi keluarga dan lingkungan masyarakat. Wujudnya dapat ditelusuri dalam bentuk material (tangible) dan non material (intangible), misalnya bahasa, sastra, kesenian, upacara, adat istiadat, keris, dan sebagainya. Maka di era pergaulan yang luas yang mencatatkan namanya pada masyarakat internasional maupun pergaulan global, dengan situasi dan kondisi keterbukaan akses internet sebagai kemajuan teknologi dan informasi, berpotensi dapat mengikis nilai-nilai kearifan lokal.

Peran Pancasila harus tetap komitmen dan konsisten atas kekuatan nilai-nilai luhur tersebut, sehingga eksistensinya dapat mempertahankan kebudayaan yang beragam dan majemuk. Karena Indonesia dengan modal kekayaan budaya harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai yang dijadikan ideologi berbangsa dan bernegara. Salah

satu upayanya adalah memberikan pemahaman, tunjuk ajar dan keteladanan serta diteruskan (warisan edukasi) untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebersamaan atas perbedaan.

Merespons dan menjawab arus zaman yang telah berubah. Kearifan lokal juga harus terimplementasikan dalam kebijakan negara, misalnya dengan menerapkan kebijakan yang berasaskan gotongroyong dan kekeluargaan sebagai salah satu wujud kearifan lokal kita. Untuk mencapai itu, perlu implementasi ideologi negara (Pancasila) dalam berbagai kebijakan negara. Dengan demikian, kearifan lokal akan efektif berfungsi sebagai *senjata tidak sekadar pusaka* yang membekali masyarakatnya dalam merespons dan menjawab arus zaman. Menggali dan melestarikan berbagai unsur kearifan lokal, tradisi dan pranata lokal, termasuk norma dan adat istiadat yang bermanfaat, dapat berfungsi secara efektif dalam pendidikan karakter, sambil melakukan kajian dan pengayaan dengan kearifan-kearifan baru.(Fajarini, 2014).

B. Kearifan Lokal Membangun Mental Global

Kearifan lokal merupakan modal pembentukan karakter luhur. Kearifan-kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bangsa memiliki akar. Membangun jati diri bangsa melalui pendidikan berwawasan kearifan lokal (local genius) pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional. Pendidikan adalah gerakan kultural, maka untuk membentuk karakter peserta didik harus melalui pembentukan budaya sekolah yang berkarakter. Menggali

dan menanamkan kembali kearifan lokal secara inheren melalui pendidikan dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya membangun identitas bangsa dan sebagai semacam filter dalam menyeleksi pengaruh budaya lain. Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkrit yang mereka hadapi. (Daniah, 2016)

Penanaman nilai-nilai kearifan lokal yang berkontribusi pada penguatan jati diri atau kepribadian bangsa yang dikenal dengan karakter bangsa. Penguatan dimensi karakter bangsa dapat diraih dengan upaya mentransfer dan mentransformasikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu pondasi dalam penguatan karakter bangsa. Jika merujuk pada desain induk pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025 maka beberapa pendekatan kajiannya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis;
- 2) Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya mengejewantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan 6 karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara;
- 3) Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik

pada zaman penjajah, maupun pada zaman kemerdekaan;

- 4) Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural

Nilai-nilai budaya yang ada harus tetap dilestarikan agar terus eksis sebagai wujud kepastian ideologi Pancasila yang diakui mampu menciptakan harapan, cita-cita dan tujuan hidup berbangsa dan bernegara dalam bingkai keberagaman budaya. Maka upaya pembangunan karakter bangsa apabila kurang memperhatikan nilai-nilai budaya tersebut dapat mengalami degradasi jati diri atau memudarnya bahkan hilangnya kepribadian bangsa yang dicatatkan pada nilai-nilai luhur.

Desain induk pembangunan karakter bangsa pemerintah republik indonesia tahun 2010-2025, jika tidak merujuk pada nilai-nilai luhur budaya yang terkandung dalam Pancasila maka berpotensi terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Disorientasi dan belum dihayati nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa;
- 2) Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila;
- 3) Bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan bernegara,
- 5) Ancaman disintegrasi bangsa; dan
- 6) Melemahnya kemandirian bangsa.

Enam hal yang diidentifikasi oleh desain induk pembangunan karakter bangsa pemerintah republik indonesia tahun 2010-2025, maka upaya menghindari hal tersebut peran pembangunan karakter bangsa wajib melibatkan berbagai pihak baik keluarga, lingkungan sekolah, serta masyarakat luas. Keterlibatan secara integratif dan holistik sebagai alat utama dalam menciptakan identitas karakter bangsa secara kompeten dan komitmen yang bersatu padu secara menyeluruh dari berbagai aspek bidang sosial. Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa perlu dilakukan tidak hanya di aspek pendidikan saja melainkan peran aktif di luar sekolah atau pada masyarakat secara umum sesuai dengan kearifan budaya lokal masing-masing (Indonesia, 2010)

Lokal genius, indigenous knowledge atau local wisdom dapat digali secara ilmiah dari produk kultural dengan interpretasi yang mendalam. Perilaku keberagamaan merupakan respon dari realitas mutlak sesuai dengan konsep Joachim Wach atau imam Abu al-Hasan al-Asy'ary. Untuk mewujudkan satuan perilaku beragama diperlukan suatu proses panjang yang menyangkut dimensi kemanusiaan baik pada aspek kejiwaan, perorangan maupun kehidupan kelompok. Unsur ini disimpulkan dari sifat ajaran agama yang menjangkau keseluruhan hidup manusia, karena manusia memiliki dimensi kejiwaan perorangan atau kelompok. Untuk meningkatkan keberagamaan peserta didik perlu didukung dengan kaitan wawasan, sikap keberagamaan peserta didik dan juga pembiasaan program yang menanamkan nilai-nilai keberagamaan tersebut. Sehingga nantinya diketahui

apakah wawasan peserta didik yang luas akan ilmu agama memastikannya untuk bersikap dan berperilaku yang menunjukkan keberagaman yang baik (Affandy, 2017)

Indonesia saat ini sedang mengalami krisis identitas nasional. Ini dibuktikan dengan kajian ilmiah dari Institut Indonesia Ilmu Pengetahuan (LIPI) yang dinilai Indonesia belum siap menghadapi fenomena globalisasi dalam berbagai aspek seperti geografi, ekonomi, dan budaya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat lokal masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi dampak buruk dari globalisasi adalah menggunakan nilai-nilai kearifan lokal sebagai kekuatan. Lokal kearifan bisa berfungsi sebagai penyaring nilai-nilai yang datang dari luar itu kurang cocok dengan budaya budaya lokal. (Kurnia, 2018)

Kejeniusan lokal juga merupakan kearifan lokal. Hal tersebut berdiri dari luar budaya, kemudian diterima dan diintegrasikan budaya luar tersebut kedalam dengan tata aturan yang baik dan benar. Local genius hadir menjadi: nilai, norma, keyakinan, adat istiadat, dan aturan. Mereka memiliki arti dan fungsi khusus. Karena proses meleburnya budaya luar tersebut menjadi budaya yang di terima membutuhkan kearifan dan pasti mengalami perubahan atau perbedaan karena disebabkan interaksi dan komunikasi lintas budaya dan globalisasi. Local genius memberikan dampak dan tantangan tersendiri untuk mengeksplorasi dan mengkritiknya dengan cara ilmiah.(Sartini, 2004)

Akhir-akhir ini sering terjadi gesekan antar kelompok yang hanya ada dipicu oleh hal-hal kecil, baik di kalangan

masyarakat umum maupun kalangan terpelajar. Banyak masyarakat khawatir jika kondisi seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi bangsa akan mengalami degradasi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Transformasi nilai-nilai kearifan lokal (local genius) dalam pembelajaran Proses tersebut diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh global yang dapat merusak karakter peserta didik sejalan dengan modernisasi saat ini. Namun, Pembelajaran agama, budi pekerti, dan PPKn belum mampu secara maksimal membentuk masyarakat karakter peserta didik. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan karakter sebagai wujud revolusi mental peserta didik dengan nilai kearifan lokal (Ali, 2017).

C. Ragam Kearifan Lokal

Berikut ini merupakan beberapa contoh kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. M. Yunus Melalatoa, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jilid A-Z. Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Lihat juga Rusmin Tumanggor, "Pemberdayaan Kearifan Lokal Memacu Kesetaraan Komunitas Adat Terpencil" dalam *Jurnal. Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol.12. No.01, Januari-April 2007. h. 9-12.

1. Aceh: *Udep tsare mate syahid* (hidup bahagia, meninggal diterima Allah Swt), *Hukom ngon adat lagge zat ngon sifeut* (antara hukum dengan adat seperti zat dengan sifatnya).

2. Melayu (Deli, Kalimantan Barat, Sibolga, Sumatra Barat): *Lain lubuk lain ikannya*, di mana bumi diinjak di situ langit dijunjung.
4. Batak: *Hasangapon, hagabeon, hamoraon, sarimatua* (kewibawaan, kekayaan, keturunan yang menyebar, kesempurnaan hidup). *Nilakka tu jolo sarihon tu pudi* (melangkah ke depan pertimbangkan ke belakang).
5. Sumatra Barat: *Bulek ai dek pambuluah, bulek kato jo mupakkek* (bulat air karena pembuluh, bulat kata dengan mufakat); *Adat ba sandi syara', syara' ba sandi kitabullah* (adat berlandaskan hukum, hukum bersendikan kitab suci).
6. Wamena: *Weak Hano Lapukogo* (susah senang sama-sama); *Ninetaiken O'Pakeat* (satu hati satu rasa).
7. Bugis: *Sipakatau* (saling mengingatkan); *Sipakalebbi* (saling menghormati); *Mali Siparappe, Rebba Sipatok-kong* (saling mengingatkan, saling menghargai, saling memajukan).
8. Manado: *Baku Beking Pandei* (saling memandaikan satu sama lainnya).
9. Minahasa: *Torang Samua Basudara* (kita semua bersaudara); *Mapalus* (gotong royong); *Tulude-Maengket* (kerja bakti untuk rukun), *Baku-baku bae, bakubaku sayang, baku-baku tongka, bakubaku kase inga* (saling berbaik-baik, sayang menyayangi, tuntun-menuntun, dan ingat mengingatkan); *Sitou Timou, Tumou Tou* (saling menopang dan hidup menghidupkan: manusia hidup dan untuk manusia lain).

10. Bolaang Mangondow: Momosat (gotong royong); Moto tabian, moto tampiaan, moto tanoban (saling mengasihi, saling memperbaiki dan saling merindukan).
11. Kaili: Kitorang bersaudara (persaudaraan); Toraranga (saling mengingatkan), Rasa Risi Roso Nosimpotobe (sehati, sealur pikir, setopangan, sesongsongan).
12. Poso: (Suku Pamona, Lore, Mori, Bungku dan Tojo/Una-Una, Ampana 125 dan pendatang: Bugis, Makassar, Toraja, Gorontalo, Minahasa, Transmigrasi: Jawa, Bali, Nusa Tenggara): Sintuwu Maroso (persatuan yang kuat: walau banyak tantangan, masalah, tidak ada siapapun yang dapat memisahkan persatuan warga Poso tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan).
13. Sulawesi Tenggara: Kolosara (supremasi Samaturu (Bahasa Tolala): Bersatu, gotong royong, saling menghormati; Depo adha adhati (Muna): saling menghargai.
14. Bali: Manyama braya (semua bersaudara), Tat Twam Asi (senasib sepenanggungan), Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan), yakni Pariangan (harmoni dengan Tuhan), Pawongan (harmoni dengan sesama manusia), dan Palemahan (harmoni dengan lingkungan alam).
15. Jambi: Lindung melindungi bak daun sirih, Tudung menudung bak daun labu, Rajut merajut bak daun petai (saling tolong menolong/ saling menghargai).

16. Jawa Timur: Siro yo ingsun, ingsun yo siro (kesederajatan atau egalitarianism), Antarantaran ugo (persaudaraan).
17. Pandeglang: Saman yang berfungsi sebagai kesenian, tarekat; jalan zikir dan ketenangan hati, serta simbol-simbol yang mempunyai kekuatan magis.⁴ Melalui kegiatan Saman masyarakat Pandeglang dapat menciptakan keharmonisan, kerukunan yang bersifat gotong royong dalam membangun kebersamaan sosial dan keagamaan di antara warganya, terutama bagi warga kelompok Saman, yang mengarah pada kehidupan bersama.
18. Kalimantan Selatan: Kayuh baimbai (bekerjasama), Gawi sabumi (gotong royong), Basusun Sirih (keutuhan), Menyisir sisi tapih (introspeksi).
19. Dayak Kanayatri: Adil ka'talimo, bacuramin ka'saruga, ba sengat ka'jubata (adil sesama, berkaca surgawi, bergantung pada Yang Esa); Rumah Betang (bersama dan saling tenggang); Handep-habaring hurung (nilai 4 Neneng Habibah. "Fungsi Saman Pada Masyarakat Pandeglang (kebersamaan dan gotong royong); Betang (semangat rumah panjang).
20. Dayak Bekati: Janji baba's ando (janji harus ditepati); Janji pua' take japu (jangan janji sekedar kata-kata).
21. Dayak Bahau: Murip ngenai (makmur sejahtera); Te'ang liray (unggul di antara sesama: kompetisi sehat).
22. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Saling Jot (saling memberi), Saling pelarangin (saling melayat), Saling ayon (saling mengunjungi; silaturahmi), Saling ajinin

- (saling menghormati), Patut (baik, terpuji, hal yang tidak berlebih-lebihan), Patuh (rukun, taat, damai, toleransi, saling harga menghargai), Patju (rajin giat, tak mengenal putus asa), Tatas, Tahu, Trasma (berilmu, berakhlak/etika, bermasyarakat).
23. Sasak (Lombok): Bareng anyong jari sejujung (bersama-sama lebur dalam satu), Embe aning jarum ito aning benang (ke mana arah jarum ke situ arah benang), Endang kebet laloq leq impi (jangan terlalu terpesona oleh mimpi), Endaq ngegaweh marak sifat cupak (jangan memakai atau bersifat seperti cupak), Endaq ta beleqan ponjol dait kelekuk (jangan lebih besar tempat nasi dari pada tempat beras), Endaq ta ketungkulan dengan sisok nyuling (jangan terlena dengan siput menyanyi), Idepta nganyam memeri, beleqna embuq teloq (seperti usaha memelihara anak itik, sesudah besar memungut telurnya), Keduk lindung, bani raok (berani cari belut harus berani kena lumpur), Laton kayuq pasti tebaran isiq angin (setiap pohon pasti dilanda oleh angin).
24. Mbojo (Bima): Bina kamaru mada ro kamidi ade, linggapu sedumpu nepipu ru boda (janganlah menidurkan mata dan berdiam diri, perbantallah kayu dan perkasurlah duri kaktus), Arujiki jimba wati loa reka ba mbe-e (rejeke domba tidak bisa didapat oleh kambing), Ngaha rawi pahu (berkata, berkarya hendaklah menghasilkan kenyataan).
25. DIY/Yogyakarta: Alon-alon asal kelakon (biar pelan asal selamat: kehati-hatian), Sambatan (saling membantu).

26. Solo Jawa Tengah: Ngono yo ngono neng ojo ngono (gitu ya gitu tapi jangan gitu), Ulfah Fajarini: Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter126 Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2 Des 2014 Mangan ora mangan yen ngumpul (makan tidak makan ngumpul).
27. Lampung: Sakai samboyan (sikap kebersamaan dan tolong menolong), Alemui nyimah (menghormati tamu), Bejuluk Beadok (memberi gelar/julukan yang baik kepada orang).
28. Bengkulu dan Rejang Lebong: Adat bersendai sorak, sorak bersendai kitabulloh (mirip Sumatra Barat), Tip-tip ade mendeak tenaok ngen tenawea lem Adat ngen Riyan Cao (setiap ada tamu ditegur sapa dengan adat dan tata cara), Di mana tembilang dicacak di situ tanah digali (Bengkulu), Naek ipe bumai nelat, diba lenget jenunjung (Rejang lebong, mirip Melayu), Titik mbeak maghep anak, tuwai ati tau si bapak (kecil jangan dianggap anak, tua belum tentu dia bapak), Kamo bamo (kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan orang banyak), Amen ade dik rujuk, mbeak udi temnai benea ngen saleak, kembin gacang sergayau, panes semlang sisengok, sileak semlang si betapun (jika ada musibah, jangan mencari kambing hitam, dinginkan hati yang panas, luka agar bertangkup dan tidak berdarah). Tradisi Tabot, merupakan salah satu upacara tradisional di Kota Bengkulu “upacara Tabot”, yaitu suatu perayaan tradisional yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Muharam setiap tahun untuk memperingati gugurnya Hasan dan Husein cucu Nabi

Muhammad Saw oleh keluarga Yazid dari kaum Syiah, dalam perang di Karbala pada 61 Hijriah5 . Pada perayaan Tabot seperti perayaan Sekaten di Yogyakarta, dilaksanakan berbagai pameran serta lomba ikan-ikan, telong-telong serta kesenian lainnya yang diikuti oleh kelompok-kelompok kesenian yang ada di Propinsi Bengkulu sehingga menjadi ajang hiburan rakyat dan menjadi salah satu kalender wisata tahunan. Tabot sebagai local genius berperan sebagai perimbangan (counterbalance) terhadap pengaruh desakan dari luar yang begitu gencar. Local genius di sini dapat diartikan sebagai kecerdasan orang-orang setempat untuk memanipulasi pengaruh kebudayaan luar dan budaya yang telah ada menjadi wujud baru yang lebih indah, lebih baik serta serasi sesuai selera setempat dan sekaligus daerah itu sendiri.

29. Sampang (Madura): Abantal ombak asapo' angina (berbantal ambal, berselimut angin), Lakona-lakone, kennengga kennengge (kerjakan dengan baik apa yang menjadi pekerjaanmu dan tempati dengan baik pula apa yang telah ditetapkan sebagai tempatmu), Todus (malu), Ango'an poteo tolang, e tebang potea mata (lebih baik putih tulang dari pada putih mata).
30. Ambon (Maluku): Pela Gandong (saudara yang dikasihi, Penguatan persaudaraan lewat kegotongroyongan dalam kehidupan), Gendong beta-gendongmu jua (deritaku deritamu juga).

Gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK (Kemendikbud, 2017) perlu bertumpu dan responsif pada

kearifan lokal nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Di samping itu, Gerakan PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara agar dapat berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia.

Menjadi warga negara global atau masyarakat internasional maka PPK juga mewacanakan sebuah keidealan penguatan karakter yang harus mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh regenerasi untuk hidup pada Abad 21 (antara lain kecakapan berpikir kritis dan kreatif, penguasaan bahasa, kecakapan komunikasi, kecakapan bekerja sama dan gotong royong, kecakapan beradaptasi dan kecekatan menyesuaikan diri, semangat ingin tahu dan berimajinasi, dan literasi). Maka penguatan karakter dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebhinekaan dan perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia.

D. Penutup

Melalui pendekatan nilai kearifan lokal sebagai upaya penanaman atau pengembangan karakter bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh terpadu dan berkesinambungan. Hal ini sebagai upaya yang ideal untuk diterapkan pada aspek pendidikan. Terjadinya krisis karakter diakibatkan karena proses penanaman karakter bangsa yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena karakter hanya dibebankan pada satu pihak, seyogyanya merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah,

masyarakat dan keluarga. Kerjasama itu merupakan faktor penting untuk menciptakan kekuatan karakter yang merujuk dari nilai-nilai luhur yang diwariskan secara edukasi dari keluarga, pergaulan lingkungan masyarakat dan keteladanan pemerintah.

Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dengan mereduksi dari pergaulan dalam kehidupan sehari-hari baik dari interaksi dan komunikasi sangat membantu memudahkan proses penanaman karakter. Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai strategi penanaman karakter dalam warisan edukasi sehingga dapat melekatkan pada keribadian atau jati diri generasi ke generasinya. Sebagai upayanya adalah mendesain Integrasi nilai-nilai kearifan lokal pada penguatan karakter bangsa yang ada pada sektor pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar.

Penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal menjadi pondasi yang penting. Karena upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang bermuara pada karakter bangsa dapat membentengi dari tantangan dan ancaman pergaulan lintas budaya, masyarakat internasional maupun warga negara global. Kekhawatiran akan punah dan terdegradasinya nilai-nilai kearifan lokal rentan terjadi ketika ketebukaan akses informasi dan komunikasi. Maka salah satu upayanya adalah penguatan nilai-nilai kearifan lokal pada tiap generasi yang bertujuan pada penguatan pendidikan karakter kebangsaan, kebudayaan, religius, gotong royong, mandiri, dan integritas. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal tersebut ditunjukkan secara wujud nyata

dalam sikap, perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

Merujuk pada Gerakan PPK (Kemendikbud, 2017) sebagai Poros Pendidikan Terwujudnya Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai fondasi utama dari pembangunan karakter bangsa dan merupakan transformasi dari penanaman nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan, utamanya melalui aspek keteladanan Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, dan seluruh figur penyelenggara pendidikan serta tokoh-tokoh masyarakat. Pembangunan karakter merupakan kewajiban bersama terselenggaranya pembangunan karakter bangsa sebagai kewajiban seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku bisnis dan masyarakat/komunitas, agar segenap sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan pendidikan karakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, S. (2017) 'Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Perilaku Keberagamaan Peserta Didik', *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 2(2), pp. 201–225.
- Ali, H. (2017) 'Transformasi Nilai Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) dalam Proses Pembelajaran sebagai Upaya Pembentukan Karakter Bangsa pada SMA Se-Kabupaten Simeulue'.
- Daniah, D. (2016) 'Kearifan lokal (local wisdom) sebagai basis pendidikan karakter', *PIONIR: Jurnal Pendidikan*, 5(2).
- Fajarini, U. (2014) 'Peranan kearifan lokal dalam pendidikan karakter', *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(2), pp. 123–130.
- Indonesia (2010) *Pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025: desain induk*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Kemendikbud (2017) 'Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045', *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, pp. 1–30. Available at: <https://paska.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2018/08/170822-V.2-Generasi-Emas-2045-.pdf>.
- Kurnia, I. (2018) 'Mengungkap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kediri Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa Indonesia', *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 11(1), pp. 51–63.
- Sartini, S. (2004) 'Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafati', *Jurnal filsafat*, 14(2), pp. 111–120.

BAB III

DESAIN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERORIENTASI KEARIFAN LOKAL



A. Pendahuluan

Laporan *International Commission on Education for the Twenty-first Century* tahun 1996 kepada *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (selanjutnya, UNESCO) bertajuk *Learning: The Treasure Within* menyebutkan bahwa pendidikan masa depan dihadapkan dengan berbagai tantangan ketegangan (Delors et al., 1996). Setidaknya terdapat 6 (enam) tantangan pendidikan masa depan. Globalisasi menjadi merupakan tantangan yang paling jelas. Globalisasi memunculkan ketegangan antara pemikiran global dan kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai lokal. Tantangan ketegangan global versus lokal ini ditandai dengan dorongan untuk menjadi warga dunia dan berperan aktif sebagai bagian dari kehidupan dan budaya dunia. Dorongan mendunia itu mengancam hilangnya akar budaya lokal. Sehingga sedapat mungkin pendidikan diharapkan mempertahankan nilai-nilai lokalitas warga dunia (Delors et al., 1996; Rachman, 2016). Pendidikan dikedepankan membentuk warga dunia yang tidak kehilangan akar nilai-nilai lokal mereka, sambil

terus berperan aktif dalam kehidupan bangsa dan komunitas lokal mereka (Delors et al., 1996).

Tantangan nilai-nilai tradisi dengan nilai-nilai universal menjadi masalah abad 21 namun sangat menjadi perhatian (Delors et al., 1996; Rachman, 2016). Benturan nilai tradisional versus universal dikhawatirkan karena memungkinkan hilangnya identitas dan relasi dengan komunitas berasal, kebersamaan, gotong royong dan orang-orang merasakan paling terganggu karena perubahan ini, serta keterasingan individu yang membutuhkan pengakuan dari masyarakat (Delors, 2013; Delors et al., 1996; Rachman, 2016). Dalam kaitan untuk menghadapi tantangan ketegangan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus benar-benar didesain agar sedapat mungkin tangguh untuk menghadapi tantangan ketegangan kekinian dan keakanan dalam globalisasi, seperti dalam laporan bertajuk *Learning: The Treasure Within* di atas.

Permasalahan arus utama sebagai dampak globalisasi sangat kompleks. Gagasan “*back to basic*” dianggap menjadi penting untuk meredam meluasnya masalah bangsa sebagai dampak globalisasi dan perkembangan teknologi tanpa menghentikan pembangunan yang sedang berjalan (Masyitoh, 2015). Gagasan untuk mengetengahkan kearifan lokal kembali digulirkan untuk meningkatkan kualitas dan modernisasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Gagasan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran PKn menurut Ismadi (dalam Purwanto, 2014) merupakan solusi persoalan tersebut. PKn harus berpegang

pada akar dan *living values* bangsa Indonesia agar warga tidak kehilangan identitas lokalitasnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menyebutkan bahwa pendidikan nasional dikembangkan berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945, maka PKn telah memiliki dasar yang kuat yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pemosisikan Pancasila menjadi entitas inti (*core values*) dari materi muatan PKn (Fearnley-sander & Ella, 2008). Selain itu, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebelum diubah dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa PKn dapat memasukan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Dengan demikian dapat dipahami bahwa PKn tepat mengintegrasikan muatan materi keunggulan lokal untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. PKn yang berakar pada *living values* mendorong peneguhan identitas budaya warga dalam globalisasi (Rachman, 2016). PKn di Indonesia berupaya mewujudkan warga yang mampu berpikir global dan bertindak lokal, serta memiliki komitmen terhadap bangsa dan negaranya (*think globally, act locally and commit nationality*) (Santika & Purana, 2019).

Desain pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal diharapkan dapat meminimalisir tantangan PKn era global. Dengan mendesain pembelajaran PKn, guru dapat mengintegrasikan kearifan lokal serta meminimalisasikan masalah-masalah siswa dalam belajar PKn. Menurut Shambaugh (dalam Sanjaya, 2008, hal. 67) menyebutkan

bahwa desain pembelajaran adalah *an intellectual process to help teacher systematically analyze learner needs and construct structures possibilities to responsively address those needs*. Desain pembelajaran merupakan proses sistematis menganalisis kebutuhan siswa untuk membangun kemungkinan struktur aktivitas pembelajaran yang secara responsif untuk membantu guru memenuhi kebutuhan belajar PKn siswa tersebut.

Dick, Carey, & Carey (2015) menyatakan bahwa desain pembelajaran merupakan kesatuan aktivitas yang merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi terhadap satu sistem pembelajaran yang sedang dikembangkan untuk memperoleh aktivitas belajar siswa yang efektif dan efisien. Desain pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal dilakukan guru untuk mengenal kebutuhan belajar PKn siswa, termasuk tantangan masa depan siswa dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran. Desain pembelajaran PKn membantu guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang membantu siswa untuk belajar dengan semudah mungkin untuk memaksimalkan pencapaian tujuan belajar.

B. Materi Muatan Berbasis Kearifan Lokal

Materi pembelajaran adalah substansi kompetensi yang diterjemahkan dalam bentuk bahan-bahan yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai standar kompetensi yang diharapkan kurikulum (Sanjaya, 2008, hal. 141). Materi pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, bahkan dalam aktivitas belajar yang berpusat pada siswa (*student center learning*), materi

pembelajaran merupakan orientasi yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Materi pembelajaran tidaklah semata-mata memuat pengetahuan (*knowledge*), namun juga memuat keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Sanjaya, 2008, hal. 142). Karenanya Merrill (Sanjaya, 2008) membedakan isi materi pembelajaran ke dalam empat dimensi, yaitu: konsep, prosedur, fakta dan prinsip.

Desain pengembangan materi PKn berbasis kearifan lokal dapat dimulai memanfaatkan berbagai sumber materi pembelajaran. Materi muatan pembelajaran PKn tentu sudah disediakan dalam buku ajar atau kurikulum pendidikan yang berlaku. Perkembangan zaman dan kebaruan penting untuk menyesuaikan materi muatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Pengembangan materi ajar dapat dilakukan dengan mengintegrasikan materi pembelajaran dengan nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan gagasan atau filosofi setempat yang bijaksana atau kecendekiaan yang memuat nilai-nilai, etika, cara-cara, tradisi dan perilaku baik yang melembaga, tertanam dan diikuti oleh anggota atau masyarakat suatu wilayah secara tradisional (Martati, 2019).

Menurut Sanjaya (2008) pengembangan materi ajar berbasis kearifan lokal dapat dikembangkan dengan berbagai sumber materi pembelajaran, seperti: (a) tempat atau lingkungan; (b) orang atau narasumber; (c) objek; dan (d) bahan cetak dan noncetak. *Pertama*, tempat atau lingkungan sebagai sumber pengembangan materi ajar. Ada

dua bentuk lingkungan yang dapat digali untuk mengembangkan materi muatan PKn. Lingkungan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar seperti lingkungan *by design* dan lingkungan yang tidak didesain. Lingkungan sebagai sumber pengembangan materi pembelajaran *by design* seperti lingkungan sekolah yang telah didesain kondusif dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan lingkungan belajar di sekolah. Lingkungan sekolah dapat didesain mengandung unsur nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat pencapaian tujuan pembelajaran PKn. Sementara lingkungan yang tidak didesain namun dapat menjadi sumber pengembangan materi pembelajaran. Lingkungan sebagai sumber belajar, contohnya lingkungan masyarakat Minangkabau yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, dan lingkungan budaya lainnya. Muatan materi substansi yang diperoleh dari lingkungan dapat diintegrasikan dalam materi pembelajaran.

Kedua, orang atau narasumber sebagai sumber pengembangan materi ajar. Materi ajar dapat dikembangkan dengan memperoleh sumber materi baru dari setiap orang. Pengembangan materi ajar berbasis kearifan lokal dapat memperoleh informasi melalui budayawan, sejarawan, seniman, tokoh adat, masyarakat adat, pelestari nilai-nilai budaya lokal, dan sebagainya. *Ketiga*, objek atau benda sesungguhnya dapat memberikan informasi kepada siswa. Guru dapat mengambil contoh-contoh seperti situs cagar budaya, candi dan peninggalan sejarah lainnya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, sedapat mungkin guru dapat

memberikan contoh dan kontekstualisasi materi pada dunia nyata disekitar lingkungan belajar siswa.

Keempat, bahan cetak dan noncetak. Sumber belajar berupa bahan cetak seperti buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang memuat substansi pengembangan materi pembelajaran. Bahan bahan cetak yang umum seperti buku cerita rakyat, buku dongeng, komik, alat peraga dan lain-lain dalam bentuk cetak. Sementara bahan non cetak adalah file digital yang memuat informasi yang dapat mengembangkan materi ajar. Bahan non cetak seperti video cerita rakyat, film, bahan tayangan, dan sebagainya yang berupa file digital.

Materi muatan PKn yang telah tersedia dalam buku cetak dan kurikulum dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal merupakan wujud dari pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan lingkungan (Santika & Purana, 2019). Pasal 36 ayat (2) UU Sisdiknas menyebutkan bahwa “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.” Integrasi muatan materi PKn berbasis kearifan lokal dapat dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran berbasis kearifan lokal atau pengembangan materi muatan PKn secara langsung (Santika & Purana, 2019).

Ketersediaan materi ajar PKn berbasis kearifan lokal tentu harus diimbangi dengan pengemasan materi ajar. Guru dapat menggunakan media pembelajaran dan memanfaatkan sumber belajar anak untuk menyampaikan

muatan materi PKn. Menurut Sanjaya (2008) pengemasan materi ajar harus memperhatikan (1) kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai; (2) kesederhanaan; (3) unsur-unsur desain pesan; (4) pengorganisasian materi dari konsep yang umum menuju konsep yang lebih spesifik; (5) kemenarikan pengemasan dengan memanfaatkan media pembelajaran.

C. Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal

Desain proses pembelajaran PKn mampu memberikan kemudahan siswa dalam mencapai tujuan belajar. Desain proses pembelajaran bertujuan untuk menciptakan aktivitas belajar siswa yang lebih efektif dan efisien, serta memudahkan pembelajaran yang lebih mudah, yang didasarkan pada berbagai konsep pembelajaran (Abidin, 2014; Morrison, Ross, Morrison, & Kalman, 2013). Proses pembelajaran PKn yang efektif dan efisien untuk mewujudkan warga yang *think globally, act locally and commit nationality* juga perlu didesain. Salah satunya dengan mengintegrasikan pembelajaran PKn dengan nilai-nilai kearifan lokal (Rohman, 2019; Santika & Purana, 2019; Yuniari, Putra, & Manuaba, 2014).

1. Media dan Sumber Belajar PKn Berbasis Kearifan Lokal

Proses pembelajaran PKn pada hakikatnya adalah proses komunikasi (Hamdani, 2011; Sanjaya, 2008). Guru berperan sebagai pengantar pesan berupa materi pembelajaran dan siswa sebagai penerima pesan. Namun, proses komunikasi sering mengalami hambatan, sehingga diperlukan alat bantu untuk guru dan siswa untuk memastikan proses komunikasi berjalan dengan efektif.

Alat bantu tersebut disebut media pembelajaran (Sanjaya, 2008). Media pembelajaran adalah manusia, materi, alat atau kejadian yang dapat perantara penyampai materi ajar, membangun kondisi dan pengalaman belajar yang memudahkan siswa memperoleh sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan (Arsyad, 2013).

Untuk memilih media pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan materi dan kompetensi yang diharapkan dari proses pembelajaran, guru dapat memperhatikan beberapa prinsip (adaptasi dari Sanjaya, 2008) berikut:

- a. Media pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Karenanya media pembelajaran PKn yang dipilih bukanlah sebagai alat hiburan, namun semata-mata untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar.
- b. Media pembelajaran PKn berbasis kearifan harus berdasarkan konsep yang jelas. Media dipilih tidak berdasarkan keinginan tetapi mengandung nilai-nilai kearifan yang sesuai dengan materi muatan yang diajarkan dalam rangka memperkuat pencapaian tujuan belajar.
- c. Media harus sesuai dengan karakteristik siswa di kelas. Media pembelajaran hendaknya familiar, dapat digunakan dan dimengerti walau terdapat perbedaan karakteristik siswa di kelas.
- d. Media pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal dipilih dengan mempertimbangkan gaya belajar siswa dan kemampuan guru untuk menggunakannya. Oleh

- karena itu, penting mempelajari muatan, dan prosedur media yang akan digunakan tersebut.
- e. Media yang dipilih harus sesuai dengan kondisi lingkungan belajar, fasilitas, waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan dan membelajarkan materi PKn.
 - f. Media pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal harus efektif, efisien, inovatif serta mudah untuk dioperasikan.

Selain media pembelajaran, sumber belajar juga menjadi penting dalam desain pembelajaran berbasis kearifan lokal. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang ada di lingkungan belajar yang secara fungsional dapat dijadikan sumber untuk memperoleh substansi materi aja yang dibutuhkan untuk optimalisasi hasil belajar siswa (Sanjaya, 2008). Optimalisasi upaya mewujudkan warga yang mampu berpikir global dan bertindak lokal, serta memiliki komitmen terhadap bangsa dan negaranya (*think globally, act locally and commit nationality*) tidak hanya berfokus dari hasil belajar (output) namun juga interaksi siswa dengan berbagai sumber yang dapat memberi *treatment* kepada siswa untuk mencapai tujuan belajar (Sanjaya, 2008; Santika & Purana, 2019). Desain pembelajaran PKn dengan mendekati siswa pada sumber belajar berbasis kearifan lokal diharapkan dapat meminimalisir tantangan PKn era global.



Gambar 3.1. Wayang Sebagai Media Pembelajaran
(Prayitno, 2017)



Gambar 3.2. Wayang Sebagai Media Pembelajaran
(Susilaningasih & Ferantika, 2019)

Media pembelajaran berbasis kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan salah satunya adalah wayang. Gambar 3.1 dan gambar 3.2 diatas merupakan produk desain wayang sebagai media pembelajaran. Wayang juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran PPKn. Hasil penelitian tindakan kelas telah banyak menguji efektivitas wayang sebagai media pembelajaran PKn. Wayang sebagai media pembelajaran PKn dapat meningkatkan hasil belajar dan partisipasi siswa dalam pembelajaran PKn (Prayitno, 2017; Susilaningasih & Ferantika, 2019). Indonesia tentu sangat banyak produk kebudayaan bangsa yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran PKn.

Sumber-sumber belajar PKn dapat diklasifikasikan kedalam enam jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal. Sumber belajar tersebut (adaptasi dari Sanjaya, 2008), yaitu:

- a. Pesan (*massage*), pesan sebagai sumber belajar meliputi pesan formal, yaitu pesan yang disampaikan oleh lembaga resmi pemerintah, pesan dari lembaga adat tentang nilai-nilai kearifan lokal, pesan-pesan

yang disampaikan oleh guru dalam aktivitas belajar dikelas. Selain disampaikan secara lisan, pesan juga dapat disampaikan secara tulisan, seperti: dokumen peraturan perundang-undangan, khususnya tentang budaya dan kearifan lokal, dokumen berkaitan dengan kebudayaan, dokumen sejarah, literature dan sebagainya. Pesan secara non formal, dapat menjadi sumber belajar PKn yang terdapat di lingkungan peserta didik. Pesan non formal juga dapat diintegrasikan dengan bahan ajar, contohnya cerita rakyat, legenda, sejarah, wayang golek, relief pada candi, kitab kuno, peninggalan sejarah dan lain sebagainya. Pesan-pesan tersebut dapat diambil dari kearifan lokal daerah yang nilai-nilainya sesuai dan dapat diintegrasikan dalam materi muatan PKn.

- b. Orang (*people*), setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar PKn bila sesuai dengan kebutuhan belajar. Orang sebagai sumber belajar dapat bagi menjadi dua macam, pertama orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar, seperti guru, konselor, instruktur, widyaiswara, dan siapa saja yang didesain oleh otoritas pendidikan untuk menjadi sumber belajar PKn. Kedua, orang yang bukan profesi sebagai pendidik namun dapat menjadi sumber belajar, seperti budayawan, sejarawan, seniman, tokoh adat, masyarakat adat, pelestari nilai-nilai budaya lokal, polisi, hakim, pengacara dan lain-lain. Pada konteks desain sumber belajar PKn berbasis kearifan lokal, guru dapat bekerjasama dengan siapa saja yang memungkinkan dapat memberikan informasi dan

- penguatan materi muatan PKn dengan berbasiskan kearifan lokal sebagai sumber belajar.
- c. Bahan (*materials*) bahan sebagai sumber belajar PKn adalah segala sesuatu file atau berkas yang dapat menyimpan materi muatan pembelajaran. Contohnya buku paket, buku teks, modul, buku cerita rakyat, video cerita rakyat, film, bahan tayangan, alat peraga dan sebagainya.
 - d. Latar (*setting*), latar atau lingkungan juga dapat menjadi sumber belajar PKn. Lingkungan di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik secara khusus dirancang maupun yang secara alamiah dapat digunakan sebagai sumber belajar. Lingkungan sekolah dapat didesain mengandung unsur nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat pencapaian tujuan pembelajaran PKn. Lingkungan luar sekolah dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber belajar, contohnya lingkungan masyarakat Minangkabau yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, dan lingkungan budaya lainnya.

2. Strategi Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal

Kata strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) adalah rencana yang cermat mengenai sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan khusus. Bila dihubungkan dengan proses belajar mengajar maka strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih dan terencana untuk mencapai kompetensi yang diharapkan melalui proses interaksi, dan penyampaian

materi muatan untuk pengembangan pengalaman belajar kepada siswa (Hamdani, 2011; Lubis, 2015). Menurut Hamdani strategi belajar mengajar tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, namun juga termasuk materi muatan yang disampaikan (Dick et al., 2015; Hamdani, 2011). Karenanya pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal penting untuk mendesain strategi pembelajarannya. Desain strategi pembelajaran termasuk juga menentukan dan mengembangkan pendekatan, model, dan metode pembelajaran.

Desain pembelajaran PKn di kelas berbasis kearifan lokal dapat dilakukan secara kontekstual dan bermakna. Pendekatan dalam pembelajaran merupakan arah umum pembelajaran yang mencakup komponen yang lebih tepat atau perinci (Yaumi, 2013). Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikembangkan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa (Lubis, 2015; Muslich, 2007; Shoimin, 2018; Yuniari et al., 2014). Dengan demikian pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk membuat pengetahuan yang diperoleh dan telah dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran PKn secara kontekstual dapat membangun pembelajaran yang menghubungkan materi muatan dengan konteks yang relevan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk menghubungkan materi pembelajaran PKn dengan kehidupan sehari-hari, memberikan kesempatan

mengintegrasikannya dengan kearifan dan budaya yang berada di lingkungan keseharian siswa. Guru dapat memberikan inovasi pembelajaran dengan melakukan pembelajaran kontekstual dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam muatan materi atau aktivitas belajar dengan menjadikan sebagai salah satu sumber belajar siswa. Pembelajaran kontekstual memiliki ciri utama (Komalasari, 2017), yaitu:

- a. pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*);
- b. memanfaatkan berbagai konteks (*using multiple contexts*);
- c. menggambarkan keanekaragaman siswa (*drawing upon student diversity*);
- d. mendukung pembelajaran mandiri (*supporting self-regulated learning*);
- e. menggunakan kelompok belajar dalam suasana saling ketergantungan (*using independent learning groups*);
- f. menggunakan penilaian autentik (*using authentic assessment*).

Pembelajaran kontekstual PKn dapat mengangkat masalah-masalah bangsa untuk dianalisis berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, atau mengkaji nilai-nilai kearifan lokal sesuai dengan konteks materi yang diajarkan. Guru harus mempertimbangkan berbagai konteks yang dekat dengan keseharian siswa, serta memanfaatkannya. Guru dapat mendorong siswa secara mandiri untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan keseharian siswa. Sehingga kontekstualisasi materi pembelajaran PKn sangat dekat dengan nilai kearifan lokal. Untuk mendukung upaya

pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal maka pembelajaran kontekstual memiliki 5 strategi, yaitu *relating*, *experiencing*, *applying*, *cooperating* dan *transferring* (Shoimin, 2018). Desain pembelajaran kontekstual PKn untuk dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan (Lubis, 2015; Shoimin, 2018):

a. Kegiatan Pendahuluan

- 1) Guru terlebih dahulu menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- 2) Guru melakukan apersepsi untuk pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan dan mulai stimulus awal merelasikan pengetahuan tersebut dengan nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan siswa;
- 3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang dipelajari pembelajaran. Guru dapat mengangkat dan menginterasikan nilai-nilai kearifan lokal kedalam materi yang dijelaskan dengan memperhatikan tujuan pembelajaran.

b. Kegiatan Inti

- 1) Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok untuk untuk nantinya meminta kelompok untuk berdiskusi dalam menemukan berbagai konsep, prinsip, teori dan jawaban-jawaban yang diberikan guru, serta yang muncul dari hasil aktivitas pembelajaran;

- 2) Guru berkeliling memberikan stimulus untuk mengarahkan siswa mengembangkan pikirannya untuk melakukan kegiatan yang berkesan, baik, dengan cara yang diminati siswa. Siswa diminta aktif menemukan konsep, prinsip, teori dan jawaban-jawaban yang muncul dari aktivitas pembelajaran. Peran guru hanya menjadi fasilitator siswa untuk mengkonstruksikan sendiri kompetensi yang baru dari aktivitas dan pengalaman belajar yang telah dilalui;
- 3) Guru membimbing siswa untuk menemukan fakta dari permasalahan atau materi telah disajikan;
- 4) Siswa wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan alasan permasalahan yang diajukan guru melalui lembar kerja peserta didik;
- 5) Guru menstimulasi siswa untuk mengajukan pertanyaan guna memancing siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahunya;
- 6) Siswa diminta untuk menanggapi presentasi hasil diskusi kelompok yang telah presentasi;
- 7) Berdasarkan hasil presentasi kelompok guru bersama siswa membahas penyelesaian masalah yang tepat. Pada sesi ini guru dapat memberi stimulus siswa dengan mengintegrasikan materi dengan nilai-nilai kearifan lokal;
- 8) Guru mendemonstrasikan materi ajar PKn dengan model atau media pembelajaran yang digunakan yang dapat mengangkat nilai-nilai

kearifan lokal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

c. Kegiatan Penutup

- 1) Guru bersama siswa melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
- 2) Guru melakukan evaluasi perkembangan kemampuan siswa setelah melalui pengalaman belajar.

Pendekatan kontekstual berbasis kearifan lokal diharapkan dapat didesain dengan mengintegrasikan media dan sumber belajar yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dekat dan berada di lingkungan belajar siswa. Dengan demikian, secara tidak langsung pengalaman belajar mendorong siswa untuk mengembangkan sikap positif sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat (Ramdani, 2018). Siswa dapat terdorong untuk aktif mengembangkan pengalaman belajar dengan secara langsung menerapkan konsep perilaku-perilaku yang telah dipelajarinya di kelas.

Selain pembelajaran kontekstual, pendekatan pembelajaran bermakna penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal. Menurut David P. Ausubel (1968) pembelajaran bermakna adalah proses dimana siswa mampu mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan terhadap struktur kognitif pembelajar. Seseorang dikatakan belajar bilamana dapat merelevansikan materi pembelajaran yang disampaikan dengan informasi-informasi yang telah tersimpan dalam struktur kognitifnya (Dahar, 2006).

Pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal yang bermakna dapat memanfaatkan perbedaan dari karakteristik peserta didik di kelas. Guru dapat memanfaatkan perbedaan aspek kultural siswa untuk mengelaborasi substansi materi pembelajaran. Pembelajaran PKn bermakna dapat memanfaatkan perbedaan aspek kultural siswa untuk menggali ulang pengetahuan buaya dan contoh yang berada di sekitar lingkungannya dan mengaitkannya dengan muatan materi pembelajaran yang disampaikan.

Guru sedapat mungkin jelaskan materi dengan contoh yang dekat dengan lingkungan, sekitar rumah, familiar dan pengetahuan lalu yang telah dimilikinya. Misalnya pada materi berkaitan dengan Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat kelas VII dan VIII, guru dapat merelevansikan sila keempat Pancasila yang digali dari nilai-nilai dan budaya bangsa, contohnya pada kebudayaan masyarakat Minangkabau. Guru dapat menampilkan gambar, meminta siswa untuk menceritakan budaya musyawarah yang pernah diikutinya hingga pada nilai-nilai apa yang diambil sebagai penguatan kompetensi dalam mencapai tujuan belajar.



Gambar 3.3. Musyawarah dan Mufakat Masyarakat Minangkabau (Minangku.com, n.d.)

Pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal dapat diajarkan dengan mengkombinasikan dengan pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna mengharuskan materi PKn disusun dan disampaikan ke dalam dari materi yang paling umum, kemudian hingga yang paling khusus (Dahar, 2006, hal. 101–102). Berikut ini salah satu contoh digambarkan penjelasan muatan materi yang disusun dari konsep umum hingga lebih khusus, hingga pada implementasinya dalam kehidupan budaya masyarakat.

Pembelajaran PKn yang bermakna yang mengintegrasikan kearifan lokal diawali dengan prakondisi siswa. Prakondisi (pengaturan awal) dalam pembelajaran bermakna adalah rangkaian aktivitas guru untuk mendorong siswa mengakses informasi terdahulu (Dahar, 2006, hal. 100–101). Pengetahuan tersebut hendaknya berkaitan dengan materi dan nilai-nilai kearifan lokal yang dekat dengan siswa guna menjadi stimulus untuk memahami materi yang akan diajarkan selanjutnya.

Contohnya materi Pancasila “memahami kedudukan dan fungsi Pancasila” dalam mata pelajaran PPKn tingkat SMP/ sederajat kelas VIII, guru dapat meminta siswa untuk mengingat kembali materi PPKn SMP kelas VII “perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara”. Prakondisi tersebut membantu siswa merelevansikan materi pembelajaran yang disampaikan dengan informasi-informasi yang telah tersimpan dalam struktur kognitifnya sebagaimana pendapat Ausubel (Dahar, 2006).



Gambar 3.1. Mengembangkan Materi Secara Bermakna (dikembangkan dengan merujuk Latief, 2011, 2020; Riyanto, Ohoitumur, Mulyono, & Madung, 2015)

Membangun kebermaknaan melalui pengaturan awal saat penyampaian materi Pancasila PKN di Indonesia dilakukan mendorong siswa untuk mengakses nilai-nilai kearifan lokal yang telah dipahami oleh siswa. Saat menjelaskan sila ketiga Pancasila, guru dapat menghubungkan nilai-nilai persatuan dengan budaya gotong royong yang telah berkembang dalam masyarakat

Indonesia. Selain itu, nilai-nilai kearifan masyarakat Kei yang menghayati kesatuan diri sebagai anggota satu kekerabatan. Masyarakat Kei memiliki pemahaman *Ain ni Ain* yang menggambarkan cara orang Kei melihat orang lain dan menghargai persatuan (Ohoitumur, 2015, hal. 260). Setiap orang dalam masyarakat Kei mengintegrasikan diri dalam sistem ikatan didasarkan sistem keluarga. Keluarga dalam masyarakat Kei tidak sebatas “keluarga batin” (ayah, ibu dan anak), melainkan keluarga dalam arti luas (*extended family*). Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kei merupakan wujud nilai-nilai Persatuan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia (Ohoitumur, 2015). Contoh masyarakat Kei yang memiliki budaya persatuan ini dapat menjadi *treatment* untuk siswa yang menjadi bagian masyarakat Kei. Maka penting guru untuk memahami karakteristik aspek kultural siswa. Siswa dengan kultural yang masing-masing dapat diberikan *treatment* berdasarkan latar belakang budayanya dalam menyampaikan materi pembelajaran.

Pembelajaran PKn bermakna dengan mengintegrasikan nilai-kearifan lokal hendaknya dapat didesain untuk membantu siswa mengintegrasikan pengetahuan yang dimilikinya. Guru dapat mengembangkan aktivitas pengalaman belajar siswa dengan melakukan (*doing*); mengamati (*observing*); memberikan contoh (*exempling*) dan menjelaskan (*explaining*) fenomena dan materi secara bertahap (Dahar, 2006, hal. 103–104). Misalkan mengamati atau memberikan contoh nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diintegrasikan dengan substansi materi muatan PKn.

D. Penutup

PKn dewasa ini dan masa depan dihadapkan dengan berbagai tantangan global. Keharusan mendunia berpotensi untuk hilangnya akar budaya lokal dan nasionalisme. PKn diharapkan dapat mempertahankan nilai-nilai lokalitas warga Indonesia yang mendunia. Gagasan “*back to basic*” dengan menengahkan kearifan lokal menjadi topik diskusi arus utama untuk meningkatkan kualitas dan modernisasi PKn solusi persoalan tersebut. Upaya tersebut tampak dari bila guru mampu mendesain pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal dan berpegang pada akar dan *living values* bangsa Indonesia agar warga tidak kehilangan identitas lokalitasnya. PKn berupaya mewujudkan warga yang cakap saat berpikir global dan dan mampu bertindak lokal, serta berkomitmen terhadap bangsa dan negaranya. Guru harus mampu mengembangkan materi muatan PKn dengan memanfaatkan berbagai sumber materi pembelajaran. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya bangsa, secara khusus nilai budaya lokal yang dekat dengan siswa. Materi ajar PKn dapat bersumber dari seperti: (a) tempat atau lingkungan; (b) orang atau narasumber; (c) objek; dan (d) bahan cetak dan noncetak yang keseluruhannya mengandung nilai-nilai kearifan lokal.

Pembelajaran PKn dapat menggunakan media-media pembelajaran berbasis kearifan lokal. Media belajar PKn berbasis kearifan dapat manusia, materi, alat atau kejadian yang dapat perantara penyampai, memperkuat dan mengaitkan materi ajar untuk mencapai tujuan belajar. Salah satu contoh media belajar PKn berbasis kearifan lokal adalah wayang. Berbagai penelitian menunjukkan wayang

mampu meningkatkan hasil belajar dan partisipasi siswa di kelas. Selain media, sumber belajar seperti budayawan, sejarawan, seniman, tokoh adat, masyarakat adat, pelestari nilai-nilai budaya lokal, dan lainnya juga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PKn. Media dan sumber belajar tersebut harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan bukanlah sebagai alat hiburan.

Pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal dapat didesain dengan pendekatan kontekstual dan bermakna. Pembelajaran PKn kontekstual dilakukan dengan memandu siswa agar mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Pembelajaran dapat menggunakan metode pembelajaran kontekstual, dimana siswa secara aktif menjadi pusat pembelajaran. Pembelajaran kontekstual dicirikan (1) berbasis masalah; (2) pemanfaatan berbagai konteks; (3) menggambarkan keanekaragaman siswa; (4) pembelajaran pun dilakukan secara mandiri; (5) siswa diminta untuk belajar berkelompok dalam suasana yang saling ketergantungan antar anggota (berdiskusi); dan (6) penilaian diperoleh dari nilai autentik. Guru dapat memberikan inovasi pembelajaran dengan melakukan pembelajaran kontekstual dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam muatan materi atau aktivitas belajar dengan menjadikan sebagai salah satu sumber belajar siswa. Pembelajaran harus memperoleh kebermaknaan, dimana siswa dapat merelevansikan materi pembelajaran yang disampaikan dengan informasi-informasi yang telah tersimpan dalam struktur kognitifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. (2014). *Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013*. Bandung: P.T. Refika Aditama.
- Arsyad, A. (2013). *Media Pembelajaran (Revisi)*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.
- Ausubel, D. P. (1968). *Education Psychology: A Cognitive View*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Dahar, R. W. (2006). *Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Erlangga.
- Delors, J. (2013). The Treasure Within: Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together and Learning to Be. What is The Value of That Treasure 15 Years after Its Publication? *International Review of Education*, 59(3), 319–330. <https://doi.org/10.1007/s11159-013-9350-8>
- Delors, J., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., Gorham, W., Kornhauser, A., ... Nanzhao, S. Z. (1996). *LEARNING: The Treasure Within. Report to Unesco of the International Commission on Education for the Twenty-First Century*. Paris: UNESCO.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (4 ed.). Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2015). *The Systematic Design of Instruction* (8 ed.). New York: Pearson.
- Fearnley-sander, M., & Ella, Y. (2008). Citizenship Discourse in the Context of Decentralisation: The Case of Indonesia. In D. L. Grossman, W. O. Lee, & K. J.

- Kennedy (Ed.), *Citizenship Curriculum in Asia and the Pacific* (hal. 111–126). Hong Kong: Comparative Education Research Center, The University of Hong Kong & Springer.
- Hamdani. (2011). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Komalasari, K. (2017). *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Latief, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Latief, Y. (2020). *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan* (Komprehens). Jakarta: Mizan.
- Lubis, E. A. (2015). *Strategi Belajar Mengajar*. Medan: Perdana Publishing.
- Martati, B. (2019). *Model Desain Pembelajaran Pengembangan Moral Berbasis Kearifan Lokal*. Surabaya: Mavendra Pers.
- Masyitoh, I. S. (2015). Peran AP3KNI Sebagai Wahana Pendidikan Karakter Berbasis Etnopedagogi Untuk Membangun Generasi Emas Kebangkitan Nasional Modern. In Sapriya, Syaifullah, M. M. Adha, & C. Cuga (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn* (hal. 674–683). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Minangku.com. (n.d.). 25+ Pepatah Minang Tentang Musyawarah & Artinya (Mufakat). Diambil 16 Juli

2021, dari minangku.com website:
<https://minangku.com/pepatah-minang-tentang-musyawarah/>

Morrison, G. R., Ross, S. M., Morrison, J. R., & Kalman, H. K. (2013). *Designing Effective Instruction* (8 ed.). Danvers: John Wiley & Sons, Inc.

Muslich, M. (2007). *KTSP: Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ohoitmur, J. (2015). Ain Ni Ain: Paham Persatuan Orang Kei. In A. Riyanto, J. Ohoitmur, C. B. Mulyono, & O. G. Madung (Ed.), *Kearifan Lokal - Pancasila: Butir-Butir Filsafat "Keindonesiaan."* Sleman: PT. Kanisius.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. (n.d.).

Prayitno, N. (2017). Pengembangan Media Wayang Profesi Tema Keperluan Sehari-Hari Untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar. *Seminar Nasional PGSD 2017 tema "Menyiapkan Generasi Unggul Melalui Pembelajaran Bermakna"* PENGEMBANGAN, 376–386.

Purwanto, S. A. (2014). *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan, Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rachman, F. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Tantangan ketegangan. In B. Mulyono, M. Murdiono, Halili, I. Arpanudin, & Suyato (Ed.), *Prosiding Konferensi*

Nasional Kewarganegaraan Ke-II; Penguatan Kajian Isu-isu Aktual Kewarganegaraan dalam Konteks Kependidikan dan Non-Kependidikan (hal. 209–221). Yogyakarta: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dan AP3Knl Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Ramdani, E. (2018). Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal sebagai Penguatan Pendidikan Karakter. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8264>
- Riyanto, A., Ohoitmur, J., Mulyono, C. B., & Madung, O. G. (Ed.). (2015). *Kearifan Lokal - Pancasila: Butir-Butir Filsafat "Keindonesiaan."* Sleman: PT. Kanisius.
- Rohman, T. (2019). Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal Di SMK Negeri 10 Bandung. *Untirta Civic Education Journal*, 4(2), 169–184.
- Sanjaya, W. (2008). *Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Santika, I. W. E., & Purana, I. M. (2019). Pengembangan Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal Bali (Study kasus di SMA N 1 Denpasar). *Seminar Nasional INOBALI*, 1186–1195.
- Shoimin, A. (2018). *68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Susilaningih, S., & Ferantika, M. (2019). The Development of Pancasila Cartoon Wayang Media on Students' Characters of 1st Grade Elementary School. *International Conference of Primary Education Research Pivotal Literature and Research UNNES 2018*

(*IC PEOPLE UNNES 2018*), 177–179.
<https://doi.org/10.2991/icpeopleunnes-18.2019.35>

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.* (n.d.).

Yaumi, M. (2013). *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 2013* (2 ed.; N. Ibrahim & D. Sidik, Ed.). Jakarta: Kencana.

Yuniari, N. M. D., Putra, M., & Manuaba, I. B. S. (2014). Pengaruh Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SD Gugus Viabiansemal. *e-Journal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–10.

BAB IV

“PROJECT CITIZEN” DENGAN MEMANFAATKAN NILAI NILAI KEARIFAN LOKAL



A. Pendahuluan

Pada bab ini, diuraikan beberapa bagian terkait dengan implementasi *project citizen* sebagai strategi dalam mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Bagian pertama, diulas tentang sejarah perkembangan, dasar pemikiran, dan tujuan *project citizen*. Bagian kedua, dijelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan *project citizen*. Bagian ketiga, dijelaskan pentingnya praktik *project citizen* dengan mengangkat isu-isu kearifan lokal. Bagian terakhir, disuguhkan pedoman penilaian dalam melaksanakan praktik *project citizen*. Berikut diuraikan penjelasan bagian per bagian secara lengkap.

B. Sejarah Perkembangan, Dasar Pemikiran, dan Tujuan *Project Citizen*

Project citizen sebagai salah satu strategi instruksional dalam pembelajaran dipandang sangat penting, terutama dalam membelajarkan peserta didik untuk terbiasa memecahkan masalah melalui kegiatan. Nurwardani, dkk.

(2016: 275), menjelaskan model *Project Citizen* pada dasarnya bertolak dari strategi “*inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning* (belajar melalui penelitian, penyingkapan, pemecahan masalah)” yang dikemas dalam model “*project*” ala John Dewey.

Model ini sangat cocok untuk diterapkan dalam berbagai pembelajaran terutama pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka menumbuhkan karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Selain itu peserta didik terlatih dalam belajar melalui menemukan berbagai permasalahan yang diamati maupun dialami; terlatih dalam penyingkapan permasalahan perlu dicarikan solusi penyelesaiannya yang bermuara pada pembentukan dan pembuatan keputusan dalam bentuk kebijakan publik yang isinya dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentunya sebelumnya diadakan kajian yang mendalam riset yang dilakukan untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

Sejarah perkembangan model ini menurut Budimansyah (2009: 1), pertama kali digunakan di California pada tahun 1992 dan kemudian dikembangkan menjadi satu program nasional oleh *Center for Civic Education* (CCE) dan Konferensi Nasional Badan Pembuat Undang-Undang Negara pada tahun 1995. Selanjutnya dijelaskan bahwa *Project Citizen* merupakan suatu *instructional treatment* yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan

demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil (*civil society*).

Dasar pemikiran *Project Citizen* menurut Budimansyah (2009: 17-19) sebagaimana yang dikutip dari Branson (1999), berasal dari lima gagasan pemikiran pendidikan kewarganegaraan dan politik. *Pertama*, demokrasi memerlukan pemerintahan sendiri dan karenanya memerlukan keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan berwarga negara. Lebih lanjut dijelaskan Budimansyah (2009), bahwa salah satu komponen yang sangat diperlukan tentang keterlibatan warga negara adalah partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Kedua, para peserta didik harus belajar bagaimana menjadi terlibat dalam kehidupan berwarga negara dengan terlibat di dalamnya, yaitu dengan menyandang kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan efektif. Jadi para peserta didik dilibatkan secara langsung dalam mengamati realitas berdasarkan pengalaman agar lebih antusias dan bersemangat. Hal ini menunjukkan cara terbaik untuk meningkatkan perkembangan kewarganegaraan para anak muda adalah dengan mendorong mereka untuk ambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Ketiga, karena para siswa tersebut menggali masalah-masalah yang ada di komunitas mereka sendiri, maka mereka mendapat banyak kesempatan untuk mempertimbangkan tentang hal-hal yang mendasar dalam inti

demokrasi, seperti hal-hal yang meliputi hak individu dan kepentingan bersama, peraturan yang disepakati kelompok mayoritas dan hak kaum minoritas, kebebasan serta persamaan. *Keempat, Project Citizen* dimaksudkan untuk diterapkan terutama oleh para peserta didik di persekolahan baik di tingkat dasar maupun di tingkat menengah tetapi program tersebut juga digunakan oleh pemuda. *Kelima, Project Citizen* menganggap kaum muda sebagai sumber kewarganegaraan, sebagai anggota yang berharga dan komunitasnya yang bernilai yang gagasan dan tenaganya dapat secara nyata dicurahkan pada masalah-masalah kebijakan publik. Peserta didik sebagai kaum muda dapat melaksanakan *Project Citizen* sebagai wahana dalam melibatkan diri untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokrasi.

Budimansyah (2009: 21), menjelaskan *Project Citizen* mempunyai tujuan yang sangat penting dalam membantu perkembangan berbagai kecakapan kewarganegaraan bagi peserta didik untuk berkewarganegaraan demokrasi. Berbagai aspek dari program tersebut dan interaksi peserta didik dengan teman-teman sebaya, dengan perwakilan pemerintah dan organisasi non-pemerintah pada waktu penelitian dilakukan secara intensif terkait dengan masalah masyarakat, memungkinkan peserta didik memiliki banyak kesempatan untuk menerapkan kecakapan intelektual dan kecakapan berpartisipasi. Di samping itu, melalui keikutsertaan mereka dalam *Project Citizen*, peserta didik memiliki satu kesempatan untuk mengembangkan berbagai watak kewarganegaraan dari kewarganegaraan demokrasi seperti arti nilai politik, kepentingan politik, toleransi politik,

komitmen terhadap tanggung jawab kewarganegaraan demokrasi, komitmen terhadap konstitusionalisme, dan kecenderungan untuk berpartisipasi secara politik. Implementasi *Project Citizen* melalui praktik-praktik dan proses-proses *project*, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab secara efektif sebagai warga negara dalam membangun demokrasi.

C. Langkah-langkah Penyusunan *Project Citizen*

Langkah-langkah dalam penyusunan *Project Citizen* terdiri atas enam langkah. Langkah-langkah tersebut adalah mengidentifikasi permasalahan kebijakan publik dalam masyarakat, memilih masalah sebagai bahan kajian kelas, mengumpulkan informasi masalah yang akan dikaji, mengembangkan portofolio kelas, menyajikan portofolio, dan merefleksikan pengalaman belajar (Center for Indonesian Civic Education, 2002 dan 2003 serta lihat juga Wahab, 2007). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi Masalah yang Ada di Masyarakat

Selaku warga masyarakat, para peserta didik hendaknya dibiasakan untuk selalu peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan yang terjadi di lingkungannya. Mereka hendaknya tidak steril dari lingkungan masyarakatnya, sebaliknya harus terbiasa terampil memecahkan masalah-masalah sosial. Oleh karena itu melalui pengajaran PKn para peserta didik harus dibina agar memiliki kecakapan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya mulai dari lingkungan terdekat, misalnya di keluarganya, hingga ke lingkungan

terjauh, misalnya masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar bangsa. Untuk meningkatkan kepekaan para peserta didik tersebut, tidak ada pilihan lain para guru hendaknya menjadikan masalah-masalah tersebut sebagai sumber belajar.

a. Kegiatan Kelompok Kecil

Untuk melakukan identifikasi masalah, diawali oleh diskusi kelas guna berbagi pengetahuan tentang masalah-masalah di masyarakat. Untuk mengerjakan kegiatan ini, seluruh siswa diberi tugas membaca dan mendiskusikan masalah-masalah yang dapat ditemukan di masyarakat. Guru membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil (3-4 orang). Setiap kelompok diminta untuk mencari satu masalah (yang terdapat dalam surat kabar, yang sebelumnya telah disiapkan), lalu mendiskusikannya dalam kelompok kecil tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita dihadapkan kepada sejumlah masalah. Kadang-kadang masalah-masalah tersebut datang silih berganti, bahkan datang pada waktu yang bersamaan. Tugas para siswa yang tengah mempelajari PKn adalah belajar memecahkannya dengan menggunakan konsep-konsep PKn. Sekali-kali para siswa selaku generasi muda tidak boleh menghindari dari masalah tersebut, sebab semakin menghindari, masalah itu akan semakin membebani diri kita sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

b. Pekerjaan Rumah

Proses diskusi dalam kelompok kecil guna mengidentifikasi dan menganalisis masalah tentu saja belum cukup memberikan informasi tentang masalah mana yang patut untuk dijadikan kajian kelas. Untuk dapat menentukan masalah mana yang akan dikaji oleh kelas, memerlukan informasi yang cukup, terutama mengenai kelayakan masalah tersebut untuk dikaji dalam konteks pelajaran PKn dan ketersediaan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan rujukan untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu para siswa harus diberi pekerjaan rumah. Ada dua hal yang harus dikerjakan mereka. *Pertama*, menemukan lebih banyak masalah kemasyarakatan yang ada di masyarakat. *Kedua*, menemukan kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

Tugas pekerjaan rumah yang harus dikerjakan para siswa meliputi tiga tugas pokok. Ketiga tugas pokok tersebut adalah tugas wawancara; tugas mencari informasi dari sumber-sumber media massa cetak; dan tugas mencari informasi melalui media massa elektronik.

1) Tugas Wawancara

Para siswa dapat melakukan wawancara dengan ayah atau ibu di rumah, teman, tetangga, dan orang lain yang dipandang memahami masalah yang sedang dianalisis. Misalnya jika ingin menggali masalah yang terjadi di seputar keluarga, ayah dan ibu dapat dimintai pendapatnya. Dapatkan apa yang mereka ketahui tentang masalah

tersebut dan bagaimana perasaan mereka berkenaan dengan masalah tersebut.

2) Tugas Mencari Informasi dari Media Massa Cetak

Para siswa dapat membaca buku, majalah, atau surat kabar yang memuat tulisan atau artikel mengenai masalah yang sedang dianalisis. Untuk memahami posisi tulisan atau artikel tersebut serta untuk memahami kebijakan apa yang ditawarkan untuk memecahkan masalah, tentu saja para siswa harus membacanya dengan seksama dan tidak cukup satu kali. Mereka membawa bahan-bahan yang diperoleh ke kelas. Selanjutnya memberitahukan bahan-bahan tersebut kepada guru dan teman sekelas. Dengan membawa bahan-bahan tersebut ke kelas akan mendatangkan keuntungan ganda. Pertama, bagi kawan-kawan lain di kelas akan menambah pengetahuan. Kedua, bagi kita sendiri akan memperoleh tanggapan yang positif untuk lebih memahami masalah yang sedang dianalisis tersebut.

3) Tugas Mencari Informasi Melalui Radio dan Televisi serta Internet

Para siswa harus mencari dan mendengarkan laporan berita pada televisi atau radio atau internet yang berkenaan dengan masalah dan kebijakan-kebijakan untuk menangani masalah tersebut. Bawalah informasi tersebut ke kelas untuk diberitahukan kepada guru dan teman sekelas.

2. Memilih Masalah Untuk Kajian Kelas

Setelah kelas memiliki cukup informasi tentang masalah-masalah yang akan dikaji, maka langkah selanjutnya adalah membuat daftar masalah dan

menentukan salah satu di antaranya untuk bahan kajian kelas.

a. Membuat Daftar Masalah

Setiap kelompok kecil yang telah selesai mengidentifikasi dan menganalisis masalah dengan dukungan informasi yang memadai, menetapkan satu masalah dan menuliskannya dalam daftar masalah di papan tulis. Dari sepuluh kelompok kecil dapat diidentifikasi sepuluh masalah, misalnya: problema anak jalanan, tawuran antarkampung, tawuran antarpelajar, problema pengangguran, sistem birokrasi yang feodalistik, budaya korupsi, rendahnya disiplin, rendahnya etos kerja, dan kemacetan lalu lintas di kota-kota metropolitan.

Setelah semua masalah terdaftar, wakil tiap kelompok kecil, selaku pengusul, diminta untuk menjelaskan mengapa masalah tersebut diangkat, seberapa penting masalah tersebut untuk dipecahkan, dan seberapa erat masalah itu dengan kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Kriteria ini sangat penting agar masalah yang dipilih itu menarik akan tetapi relevan dengan kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam hal ini, walaupun guru tidak diperkenankan mencampuri pilihan para siswa, akan tetapi memberi arahan agar masalah tidak keluar dari kajian materi pelajaran, amat dianjurkan.

b. Melakukan Pemungutan Suara

Berdasarkan hasil pemungutan suara, yang memperoleh suara terbanyak adalah masalah rendahnya disiplin pada masyarakat kita. Oleh karena itu disepakati bahwa masalah tersebut menjadi bahan kajian kelas.

3. Mengumpulkan Informasi tentang Masalah yang Akan Dikaji oleh Kelas

a. Kegiatan Kelas: Mengidentifikasi Sumber-sumber Informasi

Sekarang kelas telah memilih satu masalah untuk dikaji, maka selanjutnya kelas harus memutuskan untuk mencari informasi lebih banyak. Para siswa akan menjumpai bahwa sejumlah sumber informasi akan lebih baik dari sumber-sumber informasi lainnya. Oleh karena itu sebelumnya perlu melakukan identifikasi, sumber-sumber informasi mana saja yang akan memberi banyak informasi dan sumber-sumber mana saja yang kurang. Di samping itu sebelumnya harus diidentifikasi pula tingkat kesulitan menjangkau sumber-sumber informasi tersebut dan persyaratan yang diminta agar dapat memperoleh informasi yang memadai.

Berikut ini adalah daftar sejumlah sumber informasi yang dapat dipergunakan para siswa untuk mengumpulkan informasi. Mereka harus mengkajinya dan memutuskan sumber informasi mana yang perlu dikunjungi. Kemudian kelas dibagi ke dalam tim-tim peneliti. Setiap tim peneliti mengumpulkan informasi dari salah satu sumber yang terdaftar atau sumber lain yang diidentifikasi oleh kelas. Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan para siswa sebenarnya amat banyak. Berikut adalah contoh-contohnya yang dapat dipertimbangkan untuk dikunjungi, sesuai dengan masalah yang dibahas.

1) Perpustakaan

Perpustakaan banyak menyimpan buku-buku, surat kabar, majalah, atau publikasi lain yang berguna bagi kelas kalian sebagai sumber informasi. Kelas mengirim satu tim untuk mengunjungi perpustakaan untuk mengkaji masalah dan seluk-beluk rendahnya disiplin masyarakat kita.

2) Kantor Penerbit Surat Kabar

Para siswa juga dapat mengunjungi kantor penerbit surat kabar. Para wartawan surat kabar pekerjaannya mengumpulkan informasi tentang masalah yang ada di masyarakat dan apa yang tengah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Kantor penerbit surat kabar atau wartawan sendiri mungkin dapat memberikan *kliping* kepada tim peneliti tentang masalah yang sedang dikaji. Mereka pun dapat pula menyediakan foto-foto yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dikaji yang dapat dibeli dengan harga murah. Untuk dapat mengunjungi kantor penerbit surat kabar, mereka mengirimkan surat permohonan terlebih dahulu.

3) Biro Kliping

Tim peneliti juga dapat mengunjungi Biro Kliping untuk memperoleh berbagai tulisan tentang rendahnya disiplin masyarakat kita. Biro Kliping pekerjaannya menghimpun berita atau tulisan-tulisan dari majalah atau surat kabar untuk dijual kepada yang memerlukan. Di tempat ini biasanya sudah tersedia berita atau tulisan per topik dalam sebuah bundel. Misalnya ada topik tentang masalah ekonomi, hukum, kriminalitas, pembangunan daerah, pendidikan, tenaga kerja, dan sebagainya. Di

samping itu kita juga dapat memesan per tulisan atau per topik berita dalam lembaran-lembaran lepas. Dengan mengunjungi Biro Kliping sebenarnya tim peneliti akan terbantu untuk memperoleh informasi secara cepat. Akan tetapi tim harus menyediakan sejumlah dana untuk membelinya.

4) Pakar di Perguruan Tinggi

Pakar di perguruan tinggi, misalnya yang bergelar Dr (dokter) atau yang telah menjadi guru besar (Profesor) mungkin ahli dalam masalah yang sedang dipelajari. Tim peneliti pun dapat menghubungi beberapa ahli tersebut untuk melakukan wawancara. Mereka sangat senang dikunjungi dan berdialog dengan para siswa. Sebab salah satu tugas mereka adalah menyebarkan pengetahuan dan kepakarannya kepada masyarakat, termasuk kepada para siswa di sekolah.

5) Pakar Hukum dan Hakim

Pakar hukum dan hakim merupakan sumber informasi yang akurat tentang banyak masalah di masyarakat. Mengapa demikian? Sebab banyak di antara masalah-masalah yang ada di masyarakat itu bersinggungan dengan bidang hukum. Oleh karena itu pakar hukum dan hakim akan memiliki banyak informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Salah satu tim peneliti pun dapat mengunjungi mereka untuk memperoleh informasi tentang masalah rendahnya disiplin masyarakat kita, terutama tentang akibat yang ditimbulkannya yang berkaitan dengan masalah hukum.

6) Kepolisian

Polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Oleh karena itu mereka pada umumnya sangat memahami masalah-masalah yang ada di masyarakat, khususnya masalah-masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas kepolisian. Masalah rendahnya disiplin sering kali bersinggungan dengan masalah hukum, dengan begitu erat kaitannya dengan tugas kepolisian. Oleh karena itu kepolisian merupakan sumber yang akurat untuk mendapatkan informasi. Untuk keperluan tersebut satu tim peneliti perlu ditugasi untuk menghubungi kepolisian.

7) Kantor Legislatif

Para wakil rakyat di lembaga legislatif atau lembaga pembuat peraturan di daerah, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan menyarankan atau mendukung kebijakan publik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu apabila para siswa dapat mengunjungi dan berdialog dengan mereka yang kompeten, akan sangat membantu usaha mereka mendapatkan informasi yang akurat. Oleh karena itu satu tim peneliti dapat mengunjungi kantor DPRD untuk memperoleh penjelasan tentang masalah yang menjadi bahan kajian kelas.

8) Kantor Pemerintah Daerah

Pada setiap pemerintah daerah ada sejumlah dinas yang menangani masalah-masalah khusus, misalnya dinas pendidikan dapat dimintai keterangan oleh para siswa berkenaan dengan masalah rendahnya disiplin dan upaya

penanggulangannya, misalnya melalui proses pendidikan. Di samping itu tim peneliti juga dapat mendatangi Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) untuk memperoleh informasi tentang apa yang sedang dilakukan pemerintah daerah, melalui dinas-dinas terkait dalam menanggulangi dampak rendahnya disiplin masyarakat kita.

9) Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Kepentingan

Banyak kelompok masyarakat yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kelompok semacam ini disebut kelompok kepentingan (*interest group*). Oleh karena kelompok-kelompok tersebut demikian menaruh perhatian terhadap masalah-masalah di masyarakat, maka informasi yang mereka berikan akan sangat bermanfaat bagi kelas. Di samping informasi dari mereka itu pada umumnya akurat, mereka pun akan memberi informasi yang objektif. Beberapa kelompok kepentingan juga dikunjungi tim peneliti untuk memperoleh penjelasan mengenai upaya untuk menanggulangi asalah rendahnya disiplin masyarakat.

10) Jaringan Informasi Elektronik termasuk Internet

Sumber-sumber informasi di atas serta sejumlah sumber informasi lainnya banyak yang tersedia secara *online* melalui internet. Satu tim peneliti pun dapat *mendownload* sumber-sumber informasi tentang masalah yang dikaji tersebut.

b. Tugas Pekerjaan Rumah

Setelah kelas memutuskan sumber-sumber informasi yang akan digunakan, kelas hendaknya dibagi ke dalam tim-

tim peneliti. Setiap tim hendaknya bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang berbeda. Berikut adalah contoh pembagian tim peneliti dengan tugasnya masing-masing untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai masalah: “Rendahnya Disiplin” masyarakat kita, misalnya:

Tim Peneliti A: Mengunjungi perpustakaan, untuk mencari buku-buku dan tulisan-tulisan mengenai rendahnya disiplin masyarakat kita.

Tim Peneliti B: Mewawancarai pakar Pendidikan Kewarganegaraan dari perguruan tinggi setempat, yang memahami masalah rendahnya disiplin masyarakat kita.

Tim Peneliti C: Mengunjungi kantor pemerintah untuk mewawancarai kepala bagian kepegawaian untuk memperoleh keterangan mengenai tingkat disiplin pegawai.

Tim Peneliti D: Mengunjungi biro kliping untuk memperoleh berita atau artikel mengenai rendahnya disiplin masyarakat kita

Tim Peneliti E: Mengunjungi perusahaan tertentu untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat kedisiplinan pegawai perusahaan tersebut

Tim Peneliti F: Mengamati siaran televisi untuk memperoleh data dan informasi mengenai rendahnya disiplin masyarakat kita

Tim Peneliti G: Mengamati siaran radio untuk memperoleh data dan informasi mengenai rendahnya disiplin masyarakat kita.

Anggota tim peneliti yang ditugasi untuk menghubungi salah satu sumber informasi yang digambarkan di atas, mereka memulainya dengan memperkenalkan diri. Kemudian memberi tahu alasan mengapa tim peneliti menghubungi mereka.

Orang-orang yang bekerja pada sumber-sumber informasi biasanya adalah orang-orang yang sangat sibuk. Oleh karena itu para siswa, melalui anggota tim peneliti masing-masing, mengikuti saran-saran berikut agar tim peneliti tidak terlalu membebani kantor-kantor atau orang-orang yang dimintai informasi tersebut.

4. Mengembangkan Portofolio Kelas

a. Spesifikasi Portofolio

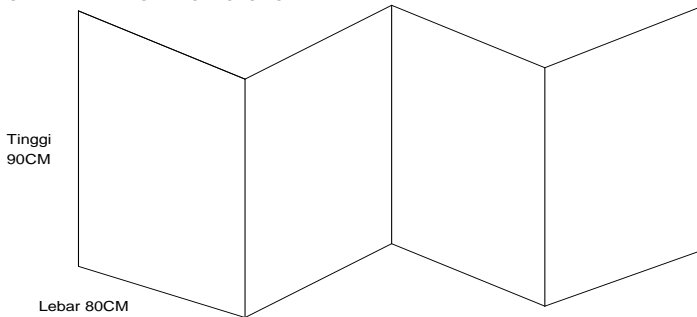
Jika informasi telah dirasakan cukup, mulailah mengembangkan portofolio kelas. Portofolio yang dikembangkan meliputi dua seksi, yaitu portofolio seksi penayangan dan seksi dokumentasi. Portofolio seksi penayangan adalah portofolio yang akan ditayangkan sebagai bahan presentasi kelas pada saat *show-case*. Adapun portofolio seksi dokumentasi adalah portofolio yang disimpan pada sebuah map jepit (binder) yang berisi data dan informasi lengkap setiap kelompok portofolio.

1) Portofolio Seksi Penayangan

Bagian ini harus terdiri atas empat lembar papan poster atau papan busa, atau yang sejenisnya, dengan

ukuran masing-masing dari keempat papan panel tersebut lebar sekitar 80 cm dan tinggi sekitar 90 cm. Karya dari masing-masing kelompok portofolio ditempatkan pada salah satu dari empat panel tayangan tersebut. Tayangan empat panel ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diletakkan di atas meja, pada papan buletin, atau pada empat kuda-kuda. Bahan-bahan yang ditayangkan dapat meliputi pernyataan-pernyataan tertulis, daftar sumber informasi, peta, grafik, foto, gambar, karikatur, karya seni asli, dan sebagainya.

GAMBAR TAYANGAN PORTOFOLIO



2) Portofolio Seksi Dokumentasi

Bagian ini merupakan kumpulan bahan-bahan terbaik sebagai dokumen atau bukti penelitian, misalnya berupa berita, artikel, gambar, foto, grafik, tabel, data lengkap hasil wawancara, data hasil analisis bahan cetak, dan sebagainya. Bahan-bahan ini harus disatukan dalam sebuah map jepit (binder) bercincin tiga. Bahan-bahan tersebut harus dipisahkan ke dalam empat bab. Bab pertama, berisi tentang penjelasan masalah; Bab kedua, tentang kebijakan-kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah; Bab

ketiga, tentang usulan kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah; dan Bab keempat, berisi tentang rencana tindakan. Gunakan pemisah berwarna beda untuk memisahkan keempat bab tersebut. Untuk mempermudah pemeriksaan, buatlah daftar isi yang disimpan di bagian muka.

b. Kelompok Portofolio

Kelas dibagi ke dalam empat kelompok portofolio. Masing-masing kelompok ditugasi untuk membuat salah satu bagian dari portofolio kelas. Setiap kelompok portofolio hendaknya memilih bahan-bahan yang dikumpulkan oleh semua tim peneliti sesuai dengan keperluannya. Berikut ini adalah tugas-tugas setiap kelompok portofolio.

- 1) *Kelompok portofolio satu: **Menjelaskan masalah.*** Yakni bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang menjadi kajian kelas dan menjelaskan mengapa masalah itu penting dan mengapa pemerintah harus memecahkan masalah tersebut.
- 2) *Kelompok portofolio dua: **Mengkaji kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah.*** Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan berbagai kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah yang telah dibuat oleh pemerintah.
- 3) *Kelompok portofolio tiga: **Mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah.*** Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengusulkan dan menjustifikasi kebijakan publik yang disepakati kelas untuk memecahkan masalah.

- 4) *Kelompok portofolio empat: **Membuat rencana tindakan.*** Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana warga negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung kelas.

5. Penyajian Portofolio (*Show-Case*)

a. Tujuan *Show-Case*

Setelah portofolio kelas selesai dibuat, kelas dapat menyajikannya dalam kegiatan *show-case* (gelar kasus) di hadapan dewan juri (*judges*). Dewan juri adalah orang dewasa yang merupakan tokoh yang mewakili sekolah dan masyarakat. Jumlahnya yang ideal sekitar tiga orang. Dewan juri ini akan menilai penyajian para siswa atas dasar kriteria yang sama seperti yang digunakan untuk membuat portofolio kelas. Kegiatan ini akan memberikan pengalaman berharga dalam menyajikan ide-ide atau gagasan-gagasan kepada orang lain dan belajar bagaimana meyakinkan mereka agar dapat memahami dan menerima ide atau gagasan tersebut. Agar kegiatan ini meriah, dapat saja kelas mengundang bapak dan ibu guru lain, kepala sekolah, perwakilan siswa dari kelas lain, orang tua murid, atau tokoh-tokoh masyarakat yang berdedikasi terhadap dunia pendidikan.

Ada empat tujuan pokok dari kegiatan *show-case* ini, yaitu sebagai berikut.

- (1) Untuk menginformasikan kepada hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi di masyarakat.

- (2) Untuk menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah sehingga hadirin dapat memahami keuntungan dan kerugian dari setiap kebijakan tersebut.
- (3) Untuk mendiskusikan kebijakan yang dipilih kelas sebagai kebijakan terbaik untuk mengatasi masalah.
- (4) Untuk membuktikan bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan dalam masyarakat, lembaga legislatif dan eksekutif yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik.

Dengan demikian setiap tujuan pokok ini adalah sesuai dengan tugas keempat kelompok portofolio yang bertanggung jawab terhadap penayangan portofolio kelas. Oleh karena itu selama penyajian portofolio, setiap kelompok bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut.

1) Persiapan

Hal-hal yang harus disiapkan sebelum *show-case* diadakan adalah portofolio itu sendiri, penyajian lisan, tempat pelaksanaan, juri, dan moderator. Kelima komponen tersebut harus sudah betul-betul disiapkan sebelum *show-case* dimulai, sebab jika salah satu komponen tersebut belum siap, *show-case* tidak dapat diselenggarakan.

Yang harus disiapkan pertama kali adalah portofolionya itu sendiri. Pastikanlah keempat panel portofolio seksi penayangan yang dibuat oleh masing-masing kelompok sudah disatukan menjadi portofolio kelas. Pastikan pula bahwa portofolio seksi dokumentasi yang

terdiri atas empat Bab sudah selesai pula disusun. Di samping itu perlu juga diperiksa apakah kelengkapan portofolio baik seksi penayangan maupun seksi dokumentasi sudah cukup memadai.

Komponen kedua adalah penyajian lisan. Para siswa hendaknya melakukan latihan menyajikan secara lisan terlebih dahulu sebelum menyampaikannya di hadapan hadirin dan dewan juri. Lakukanlah di hadapan teman-teman sekelas atau teman dari kelas-kelas lain. Para siswa dapat meminta bantuan atau petunjuk orang tua atau anggota masyarakat lainnya yang berpengalaman dalam membuat penyajian publik. Orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan atau dalam organisasi-organisasi masyarakat dan kewarganegaraan dapat memberikan bantuan yang sangat berharga. Mengapa penyajian lisan harus dilatihkan? Sebab sebanyak mungkin anggota setiap kelompok hendaknya berpartisipasi dalam penyajian. Penyajian lisan hendaknya tidak dikuasai oleh satu atau dua orang siswa saja. Penyajian lisan hendaknya memperlihatkan proses belajar kooperatif. Di samping itu, mengapa latihan perlu dilakukan karena pada saatnya nanti para penyaji tidak dibenarkan membacakan sesuatu dari tayangan portofolio kepada penilai (juri). Pilih informasi dan argumen terpenting dan sajikan menurut gaya percakapan.

Komponen lain yang harus disiapkan adalah tempat pelaksanaan. Pilihlah satu ruangan yang cukup representatif, yaitu yang diperkirakan cukup menampung hadirin yang diundang, memiliki cukup penerangan, bersih, dan jika perlu menggunakan penguat suara cukup

menggunakan semacam *awareless* dengan tiga buah mix (untuk moderator, juru bicara kelompok, dan untuk juri). Tatalah ruangan sesuai dengan keperluan *show-case*.

Komponen ketiga yang harus disiapkan adalah juri. Undanglah tiga sampai empat orang juri yang mewakili sekolah dan masyarakat. Selain mengundang melalui surat, alangkah baiknya jika beberapa orang siswa, jika memungkinkan disertai guru pembimbing, menemui langsung para calon juri. Kemukakanlah bahwa kalian sedang melakukan proyek belajar Pendidikan Kewarganegaraan melalui penyusunan portofolio kelas. Kemukakan pula perlunya beberapa orang juri untuk menilai proyek kalian itu. Jika anggota juri sudah ditetapkan dan menyatakan kesediaannya, lakukanlah *briefing* (pengarahan) tentang apa dan bagaimana juri melakukan tugasnya oleh guru pembimbing.

Komponen terakhir yang perlu disiapkan adalah moderator. Moderator dalam pelaksanaan *show-case* adalah guru pembimbing kelas yang bersangkutan. Tugas moderator itu selain memimpin jalannya pelaksanaan *show-case*, juga harus memberikan pengarahan kepada anggota dewan juri tentang tugas-tugas juri dan sistem penilaian yang dipergunakan. Di samping itu moderator pun harus meminta kesepakatan anggota dewan juri untuk menetapkan salah seorang dari mereka menjadi ketua dewan juri. Tugas ini sangat penting demi kelancaran sistem penjurian pada khususnya dan kelancaran *show-case* pada umumnya.

2) Pembukaan

Pertama-tama moderator membuka acara. Dilanjutkan dengan menginformasikan masalah yang dikaji oleh kelas dan memperkenalkan nama-nama anggota dewan juri sambil mempersilakan anggota dewan juri mengamati portofolio kelas, baik portofolio seksi penayangan maupun seksi dokumentasi. Waktu yang disediakan untuk fase ini sekitar 10 menit.

3) Penyajian Lisan dan Tanya Jawab

Langkah selanjutnya kegiatan *show-case* dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyajian Lisan Kelompok Portofolio Satu
- b) Tanya Jawab Kelompok Portofolio Satu
- c) Penyajian Lisan Kelompok Portofolio Dua
- d) Tanya Jawab Kelompok Portofolio Dua
- e) Selingan
- f) Penyajian Lisan Kelompok Portofolio Tiga
- g) Tanya Jawab Kelompok Portofolio Tiga
- h) Penyajian Lisan Kelompok Portofolio Empat
- i) Tanya Jawab Kelompok Portofolio Empat
- j) Tanggapan Hadirin
- k) Pengumuman Dewan Juri

6. Penyajian Portofolio (*Show-Case*)

Merefleksikan pengalaman belajar atas segala sesuatu selalu merupakan hal yang baik. Refeksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar, untuk menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan, dan meningkatkan kemampuan yang sudah peserta didik atau siswa miliki.

Untuk memasuki tahap ini para siswa harus sudah menyelesaikan portofolio kelas atau kelompok mereka. Sebagian bagian tambahan para peserta didik dapat memasukkan Bagian Refleksi atau Evaluasi ini dalam Bagian Dokumentasi. Bagian Refleksi ini hendaknya menggambarkan secara singkat tentang:

- Apa yang telah dipelajari oleh seorang peserta didik atau siswa dan oleh teman-teman sekelasnya atau teman komunitasnya: Bagaimana caranya?
- Cara apa yang akan peserta didik atau siswa pakai jika mereka nantinya akan mengembangkan portofolio yang lain? Masih sama dengan cara yang telah mereka pakai atau akan berbeda?

Refleksi pengalaman ini hendaklah merupakan hasil kerjasama antara teman-teman peserta didik seperti kerjasama mereka yang telah dilakukan selama membuat portofolio. Di samping itu para peserta didik juga harus merefleksikan pengalaman belajarnya baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai salah satu anggota kelas atau komunitas.

D. *Project Citizen* Berbasis Kearifan Lokal

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa model *Project Citizen* pada dasarnya bertolak dari strategi “*inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning* (belajar melalui penelitian, penyingkapan, pemecahan masalah)”. Jadi peserta didik terlatih dalam belajar melalui menemukan berbagai permasalahan yang diamati maupun dialami; terlatih dalam

penyingkapan permasalahan perlu dicarikan solusi penyelesaiannya yang bermuara pada pembentukan dan pembuatan keputusan dalam bentuk kebijakan publik yang isinya dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian di bagian penjelasan di atas juga sudah dijelaskan bahwa terdapat enam langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun *Project Citizen* yaitu: *Langkah 1*: Mengidentifikasi masalah; *Langkah 2*: Memilih masalah untuk bahan kajian kelas; *Langkah 3*: Mengumpulkan data dan informasi; *Langkah 4*: Mengembangkan portofolio kelas; *Langkah 5*: Menyajikan portofolio; dan *Langkah 6*: Merefleksi pengalaman belajar.

Selanjutnya berkaitan dengan mengembangkan portofolio kelas dalam *Project Citizen* yang kita buat memiliki tugas-tugas setiap kelompok portofolio, yaitu: *Kelompok portofolio satu: **Menjelaskan masalah***. Yakni bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang menjadi kajian kelas dan menjelaskan mengapa masalah itu penting dan mengapa pemerintah harus memecahkan masalah tersebut; *Kelompok portofolio dua: **Mengkaji kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah***. Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan berbagai kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah yang telah dibuat oleh pemerintah; *Kelompok portofolio tiga: **Mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah***. Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengusulkan dan menjustifikasi kebijakan publik yang disepakati kelas untuk

memecahkan masalah; dan *Kelompok portofolio empat: Membuat rencana tindakan*. Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana warga negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung kelas.

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka *Project Citizen* Berbasis Kearifan Lokal perlu dijelaskan bahwa permasalahan kearifan lokal apa yang perlu dikaji, termasuk di dalamnya dialami secara mendalam melalui penelitian, penyingkapan nilai-nilai kearifan lokal, dan selanjutnya diarahkan dalam mencari pemecahan masalah yang bermuara dalam pembuatan kebijakan publik. Pembuatan keputusan dalam bentuk Kebijakan Publik minimal dalam level pemerintahan di aras paling bawah yaitu di tingkat desa berupa Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa tentang penanganan masalah kearifan lokal. Bila perlu di level pemerintahan di aras yang lebih tinggi yaitu di tingkat pemerintahan kabupaten berupa Peraturan Daerah (Perda Kabupaten) atau bisa juga keputusan bupati untuk menangani kearifan lokal.

Berikut contoh kearifan lokal yang berkembang di wilayah Sumatera Utara, di antaranya “Tradisi *Sambatan Gawe* Omah masyarakat suku Jawa Di Desa Bulungihit Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara” (Yulia, 2020); “Tradisi *Merdang-Merdem* Kecamatan Munte Kabupaten Karo” (Christin, 2021); dan sebagainya. Berikut penjelasan singkat tentang kearifan lokal tersebut.

Penjelasan Singkat Kearifan Lokal “Sambatan Gawe Omah”

Sambatan adalah salah satu tradisi yang sampai hari ini tetap terjaga eksistensinya di dalam masyarakat pedesaan. “sambatan” berasal dari kata “sambat” yang berarti meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Tradisi sambatan atau di masyarakat sering disebut juga “nyambat” adalah tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat yang bersifat massal untuk membantu keluarga yang sedang memiliki keperluan atau sedang terkena musibah. Seperti membangun, memperbaiki atau memindah rumah, melaksanakan hajatan, dan juga keperluan-keperluan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Sebuah kearifan lokal yang terbentuk dari semangat gotong-royong yang tinggi di dalam masyarakat. Yang semua itu di dasarkan pada rasa kepedulian antara masyarakat satu dan lainnya.

Berkaitan dengan kegiatan sambatan, maka jika dilihat dari deskripsi teori mengenai tradisi, kegiatan sambatan dapat dikategorikan sebagai sebuah tradisi. Hal ini disebabkan karena sambatan merupakan sebuah kegiatan yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Jawa. Kegiatan ini merupakan sebuah praktik tolong menolong antar warga yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa ketika mereka sedang mengerjakan sesuatu atau membutuhkan bantuan yang oleh masyarakat Jawa dikenal dengan istilah sambatan.

Menyatukan perbedaan dan keberagaman menjadi satu rasa dan kepentingan dalam kerja untuk bahu-membahu

saling membantu. Rasa ikhlas untuk saling tolong-menolong tanpa memandang warna dan latar belakang. Tradisi yang penuh dengan semangat gotong-royong di dalam masyarakat, yang memiliki nilai kearifan lokal harus terus dipertahankan. Karena semangat itu lah yang menyatukan masyarakat dari banyaknya warna dan perbedaan. Keberagaman bukanlah hal yang membuat perbedaan antara satu dan lainnya menjadi pertentangan. Tapi perbedaan harus memberi warna yang indah dalam keberagaman yang menjadi kekuatan luar biasa di dalam masyarakat

Penjelasan Singkat Kearifan Lokal “*Merdang-Merdem*”

Merdang-Merdem atau Kerja Tahun adalah sebuah perayaan dari Suku Karo yang mendiami Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Momen merdang-merdem ini melibatkan peran serta seluruh warga masyarakat Karo, tidak terkecuali kaum muda-mudi yang juga memanfaatkan momen ini sebagai ajang untuk mencari jodoh. Gelaran acara *merdang-merdem* biasanya dimeriahkan dengan gendang guro-guro aron yaitu acara tari tradisional karo yang melibatkan pasangan mudan-mudi. Dalam proses acara merdang-merdem ini juga memiliki banyak keunikan, baik dari *Runggu* (Musyawarah) untuk menentukan acara *Merdang-Merdem*, hari-hari yang harus sesuai dengan hari tanggal Kalender Karo, lamanya acara *Merdang-Merdem* akan dilaksanakan dan banyak hal lainnya yang menunjukkan nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan persatuan.

Dua contoh di atas, hanyalah sebagian kecil dari nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diangkat ke dalam *project citizen*. Tentu masih banyak lagi nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia ini yang dapat diangkat sebagai sumber belajar dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui *project citizen*. Tujuannya tiada lain, Pendidikan Kewarganegaraan di era global memang ingin membentuk warga negara global, namun tetap bangga dengan jati diri kebangsaannya sebagai anak Indonesia.

E. Penilaian Praktik *Project Citizen*

Penilaian praktik Project Citizen pada garis besarnya ada dua yang dinilai yaitu dinilai Tayangan Portofolionya yang terdiri atas Panel Portofolio Menjelaskan Masalah; Panel Portofolio Kebijakan Alternatif, kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menangani permasalahan yang diangkat/dikaji; Panel Portofolio Kebijakan Publik atau Kebijakan Kelas yang diusulkan; dan Panel Portofolio Rencana Tindakan atau Rencana Kerja.

Sedangkan bagian yang kedua adalah penilaian Penyajian Lisan saat *show case* atau presentasinya yang terdiri atas Penilaian Penjelasan Lisan Menjelaskan Masalah; Penilaian Penjelasan Lisan Kebijakan Alternatif; Penilaian Penjelasan Lisan Kebijakan Publik atau Kebijakan Kelas yang diusulkan; dan Penilaian Penjelasan Lisan Rencana Tindakan atau Rencana Kerja. Penjelasan secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Penilaian Tayangan Portofolio 1:
 Seksi Satu: **MENJELASKAN MASALAH**

JUDUL PROJECT :
 JURUSAN/PRODI :
 KELOMPOK :

1 = rendah 2 = cukup 3 = rata-rata 4 = di atas rata-rata 5 = istimewa

INDIKATOR	SKOR	CATATAN
1.KELENGKAPAN Memuat deskripsi tentang: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat keseriusan dan ketersebaran masalah di masyarakat, negara atau bangsa ➢ Siapa yang bertanggung jawab menangani masalah. ➢ Kememadai dari kebijakan publik saat ini untuk menghadapi masalah. ➢ Ketidakepakatan dalam masyarakat jika ada, tentang masalah ➢ Individu atau kelompok utama yang berpihak masalah dan analisis posisinya. 		
2.KEJELASAN <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tersusun dengan baik ➢ Tertulis dengan baik ➢ Mudah dipahami 		
3.INFORMASI <ul style="list-style-type: none"> ➢ Akurat ➢ Cukup memadai ➢ Penting 		
4.HAL-HAL YANG MENDUKUNG <ul style="list-style-type: none"> ➢ Memuat contoh untuk hal-hal utama. ➢ Memuat alasan yang baik. 		
5.GRAFIS <ul style="list-style-type: none"> ➢ Berkaitan dengan isi bagian ➢ Diberi judul dengan tepat ➢ Memberikan informasi. ➢ Meningkatkan pemahaman 		
6.BAGIAN DOKUMENTASI <ul style="list-style-type: none"> ➢ Cukup memadai ➢ Dapat dipercaya. ➢ Berkaitan dengan tayangan ➢ Selektif. 		
TOTAL SKOR		

Penilai: ----- Tanda Tangan ----- Tanggal:.....

Penilaian Tayangan Portofolio 2:

Seksi Dua: MENGAJAI KEBIJAKAN ALTERNATIF UNTUK MENGATASI MASALAH

JUDUL PROJECT :

JURUSAN/PRODI :

KELOMPOK :

1 = rendah 2 = cukup 3 = rata-rata 4 = di atas rata-rata 5 = istimewa

INDIKATOR	SKOR	CATATAN
1. KELENGKAPAN <ul style="list-style-type: none"> ➢ Keuntungan ➢ Kerugian ➢ Pendukung ➢ Penentang 		
2. KEJELASAN <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tersusun dengan baik ➢ Tertulis dengan baik ➢ Mudah dipahami 		
3. INFORMASI <ul style="list-style-type: none"> ➢ Akurat ➢ Cukup memadai ➢ Penting 		
4. HAL-HAL YANG MENDUKUNG <ul style="list-style-type: none"> ➢ Memuat contoh untuk hal-hal utama. ➢ Memuat alasan yang baik. 		
5. GRAFIS <ul style="list-style-type: none"> ➢ Berkaitan dengan isi bagian ➢ Diberi judul dengan tepat ➢ Memberikan informasi. ➢ Meningkatkan pemahaman 		
6. BAGIAN DOKUMENTASI <ul style="list-style-type: none"> ➢ Cukup memadai ➢ Dapat dipercaya. ➢ Berkaitan dengan tayangan ➢ Selektif. 		
TOTAL SKOR		

Penilai: ----- Tanda Tangan ----- Tanggal:.....

Penilaian Tayangan Portofolio 3:
 Seksi Ketiga: **KEBIJAKAN KELAS**

JUDUL PROJECT :

JURUSAN/PRODI :

KELOMPOK :

1 = rendah 2 = cukup 3 = rata-rata 4 = di atas rata-rata 5 = istimewa

INDIKATOR	SKOR	CATATAN
1. KELENGKAPAN ➤ Keuntungan ➤ Kerugian ➤ Pendukung ➤ Penentang		
2. KEJELASAN ➤ Tersusun dengan baik ➤ Tertulis dengan baik ➤ Mudah dipahami		
3. INFORMASI ➤ Akurat ➤ Cukup memadai ➤ Penting		
4. HAL-HAL YANG MENDUKUNG ➤ Memuat contoh untuk hal-hal utama. ➤ Memuat alasan yang baik.		
5. GRAFIS ➤ Berkaitan dengan isi bagian ➤ Diberi judul dengan tepat ➤ Memberikan informasi. ➤ Meningkatkan pemahaman		
6. BAGIAN DOKUMENTASI ➤ Cukup memadai ➤ Dapat dipercaya. ➤ Berkaitan dengan tayangan ➤ Selektif.		
TOTAL SKOR		

Penilai: ----- Tanda Tangan -----Tanggal:.....

Penilaian Tayangan Portofolio 4:

Seksi Keempat: **RENCANA TINDAKAN**

JUDUL PROJECT :
 JURUSAN/PRODI :
 KELOMPOK :
 1 = rendah 2 = cukup 3 = rata-rata 4 = di atas rata-rata 5 = istimewa

INDIKATOR	SKOR	CATATAN
1. KELENGKAPAN <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memuat deskripsi tentang hal-hal berikut ini. ➤ Para pendukung di masyarakat ➤ Para penentang di masyarakat ➤ Para pendukung di pemerintah ➤ Para penentang di peme-rintah ➤ Penjelasan tentang bagaimana masing-masing individu dapat diyakinkan untuk mendukung kebijakan. 		
2. KEJELASAN <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersusun dengan baik ➤ Tertulis dengan baik ➤ Mudah dipahami 		
3. INFORMASI <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akurat ➤ Cukup memadai ➤ Penting 		
4. HAL-HAL YANG MENDUKUNG <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memuat contoh untuk hal-hal utama. ➤ Memuat alasan yang baik. 		
5. GRAFIS <ul style="list-style-type: none"> ➤ Berkaitan dengan isi bagian ➤ Diberi judul dengan tepat ➤ Memberikan informasi. ➤ Meningkatkan pemahaman 		
6. BAGIAN DOKUMENTASI <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cukup memadai ➤ Dapat dipercaya. ➤ Berkaitan dengan tayangan ➤ Selektif. 		
TOTAL SKOR		

Penilai: ----- Tanda Tangan -----Tanggal:.....

Lembar Penilaian Tayangan Portofolio: Keseluruhan

JUDUL PROJECT :
 JURUSAN/PRODI :
 KELOMPOK :
 1 = rendah 2 = cukup 3 = rata-rata 4 = di atas rata-rata 5 = istimewa

INDIKATOR	SKOR	CATATAN
1. Persuasif Memberikan alasan yang meyakinkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> ➢ masalah yang dikaji adalah penting. ➢ kebijakan yang diusulkan mengarah kepada masalah. ➢ kebijakan yang diusulkan adalah konstitusional. ➢ kebijakan dapat memperoleh dukungan publik. 		
2. Kegunaan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kebijakan yang disulkan bersifat realistik ➢ Pendekatan-pendekatan untuk memperoleh dukungan adalah realistik. ➢ Mempertimbangkan hambatan-hambatan nyata. 		
3. Koordinasi <ul style="list-style-type: none"> ➢ Bagian-bagian portofolio ➢ Berkaitan dengan yang lain ➢ Menghindari pengulangan informasi. 		
4. Refleksi <ul style="list-style-type: none"> ➢ Menunjukkan refleksi ➢ Menunjukkan terjadinya proses belajar. 		
TOTAL SKOR		

Skor portofolio keseluruhan (skor total bagian 1 – 4)

Skor Bagian Satu	Skor Bagian Dua	Skor Bagian Tiga	Skor Bagian Empat	Skor Keseluruhan	Skor Total
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pemutus Kemenangan:

Berikan sampai angka 100 untuk kualitas portofolio keseluruhan. Angka-angka ini menggunakan:

- Istimewa = 90 - 100
- Sangat Baik = 80 - 89
- Rata-rata = 70 - 79
- Di bawah rata-rata = 0 - 69

Penilai: ----- Tanda Tangan ----- Tanggal:.....

**Penilaian Penyajian Lisan Kelompok Portofolio 1:
 MENJELASKAN MASALAH**

JUDUL PROJECT :

JURUSAN/PRODI :

KELOMPOK :

1 = rendah 2 = cukup 3 = rata-rata 4 = di atas rata-rata 5 = istimewa

INDIKATOR	SKOR	CATATAN
1. SIGNIFIKANSI ➤ Seberapa besar tingkat kebermaknaan informasi yang dipilih siswa berkaitan dengan bagian portofolionya yang akan disajikan?		
2. PEMAHAMAN ➤ Seberapa baik tingkat pema-haman siswa terhadap hakikat dan ruang lingkup masalah?		
3. ARGUMENTASI ➤ Seberapa baik alasan yang diberikan siswa bahwa masalah yang dipilihnya signifikan?		
4. RESPONSIF ➤ Seberapa besar tingkat kesesuaian jawaban siswa dengan pertanyaan lanjutan yang diajukan penilai?		
5. KERJA SAMA KELOMPOK ➤ Seberapa besar kontribusi para anggota kelompok terhadap penyajian? ➤ Adakah bukti tanggung jawab bersama? ➤ Apakah para penyaji menghargai pendapat para siswa lainnya?		
TOTAL SKOR		

Penilai: ----- Tanda Tangan -----Tanggal:.....

Lembar Penilaian Penyajian Lisan Kelompok Portofolio 2:

MENGAJAI KEBIJAKAN ALTERNATIF UNTUK MENGATASI MASALAH

JUDUL PROJECT :
 JURUSAN/PRODI :
 KELOMPOK :
 1 = rendah 2 = cukup 3 = rata-rata 4 = di atas rata-rata 5 = istimewa

INDIKATOR	SKOR	CATATAN
1. SIGNIFIKANSI ➤ Seberapa besar tingkat kebermaknaan informasi yang dipilih siswa berkaitan dengan bagian portofolionya yang akan disajikan?		
2. KEJELASAN ➤ Seberapa baik tingkat pema-haman siswa terhadap kebijakan-kebijakan alternatif yang mereka identifikasi?		
3. ARGUMENTASI ➤ Seberapa baik siswa menjelaskan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian dari setiap kebijakan yang disajikan? Seberapa baik mereka mendukung penjelasan-penjasannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan lanjutan?		
4. RESPONSIF ➤ Seberapa besar tingkat kesesuaian jawaban siswa dengan pertanyaan lanjutan yang diajukan penilai?		
6. KERJA SAMA KELOMPOK ➤ Seberapa besar kontribusi para anggota kelompok terhadap penyajian? ➤ Adakah bukti tanggung jawab bersama? ➤ Apakah para penyaji menghargai pendapat para siswa lainnya?		

Penilai: ----- Tanda Tangan -----Tanggal:.....

Lembar Penilaian Penyajian Lisan Kelompok Portofolio 3:

KEBIJAKAN KELAS/KEBIJAKAN PUBLIK

JUDUL PROJECT :

JURUSAN/PRODI :

KELOMPOK :

1 = rendah 2 = cukup 3 = rata-rata 4 = di atas rata-rata 5 = istimewa

INDIKATOR	SKOR	CATATAN
1.SIGNIFIKANSI ➤ Seberapa besar tingkat kebermaknaan informasi yang dipilih siswa berkaitan dengan bagian portofolionya yang akan disajikan?		
2.PEMAHAMAN ➤ Seberapa baik tingkat pemahaman siswa terhadap keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian dari kebijakan publik yang mereka usulkan?		
3.ARGUMENTASI ➤ Seberapa baik siswa memberi alasan bahwa kebijakan yang disulkannya merupakan satu pendekatan yang rasional?		
4.RESPONSIF ➤ Seberapa besar tingkat kesesuaian jawaban siswa dengan pertanyaan lanjutan yang diajukan oleh penilai?		
5.KERJA SAMA KELOMPOK ➤ Seberapa besar kontribusi para anggota-anggota kelompok terhadap penyajian? ➤ Adakah bukti tanggung jawab bersama? ➤ Apakah para penyaji menghargai pendapat para siswa lainnya?		

Penilai: ----- Tanda Tangan -----Tanggal:.....

Lembar Penilaian Penyajian Lisan Kelompok Portofolio 4:

RENCANA TINDAKAN

JUDUL PROJECT :

JURUSAN/PRODI :

KELOMPOK :

1 = rendah 2 = cukup 3 = rata-rata 4 = di atas rata-rata 5 = istimewa

INDIKATOR	SKOR	CATATAN
1. SIGNIFIKANSI ➤ Seberapa besar tingkat kebermaknaan informasi yang dipilih siswa berkaitan dengan bagian portofolionya yang akan disajikan?		
2. PEMAHAMAN ➤ Seberapa baik tingkat pemahaman siswa terhadap langkah-langkah yang diperlukan agar kebijakan yang diusulkannya dapat diterima oleh pemerintah?		
3. ARGUMENTASI ➤ Seberapa baik siswa memberi alasan bahwa rencana tindakannya itu rasional? ➤ Seberapa baik siswa menunjukkan bahwa mereka dapat memperoleh dukungan dan mengatasi tantangan dalam masyarakatnya, lembaga pemerintah dan lembaga legislatif terhadap rencana tindakannya? ➤ Memadakah mereka mempertahankan pendapatnya pada saat tanya jawab dengan para penilai?		
4. RESPONSIF ➤ Seberapa besar tingkat kesesuaian jawaban siswa dengan pertanyaan lanjutan yang diajukan oleh penilai?		
5. KERJA SAMA KELOMPOK ➤ Seberapa besar kontribusi para anggota-anggota kelompok terhadap penyajian? ➤ Adakah bukti tanggung jawab bersama? ➤ Apakah para penyaji menghargai pendapat para siswa lainnya?		
TOTAL SKOR		

Penilai: ----- Tanda Tangan ----- Tanggal:

Lembar Penilaian Penyajian Lisan Portofolio: Keseluruhan

JUDUL PROJECT :
 JURUSAN/PRODI :
 KELOMPOK :

1 = rendah 2 = cukup 3 = rata-rata 4 = di atas rata-rata 5 = istimewa

INDIKATOR	SKOR	CATATAN
1. Persuasif ➤ Seberapa jauh keseluruhan penyajian menimbulkan daya tarik terhadap kebijakan publik yang diusulkan oleh kelas?		
2. Kegunaan ➤ Seberapa besar kebijakan yang diusulkan itu realistis? ➤ Seberapa besar pendekatan-pendekatan untuk memperoleh dukungan itu realistis? ➤ Sejauhmana kebijakan yang diusulkan dan pendekatan-pendekatan untuk memperoleh dukungan itu mempertimbangkan hambatan-hambatan nyata?		
3. Koordinasi ➤ Seberapa jelas hubungan antara masing-masing penampilan dari keempat kelompok portofolio? ➤ Apakah masing-masing penyajian dibangun dan dikembangkan atas dasar penyajian sebelumnya?		
4. Refleksi ➤ Sejauhmana penyajian itu menunjukkan bahwa siswa merefleksi pada pengalamannya? ➤ Sejauhmana penyajian itu menunjukkan bahwa siswa telah belajar dari pengalaman membuat portofolio? Menunjukkan terjadinya proses belajar.		

Skor penyajian lisan portofolio keseluruhan (skor total bagian 1 – 4)
 Tuliskan skor dari keempat bagian portofolio pada kotak yang tepat kemudian jumlahkan dengan skor portofolio keseluruhan untuk menghasilkan skor total.

Skor Bagian Satu	Skor Bagian Dua	Skor Bagian Tiga	Skor Bagian Empat	Skor Keseluruhan	Skor Total
<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>

Pemutus Kemenangan:

Berikan sampai angka 100 untuk kualitas portofolio keseluruhan. Angka-angka ini menggunakan:

- Istimewa = 90 - 100
- Sangat Baik = 80 - 89
- Rata-rata = 70 - 79
- Di bawah rata-rata = 0 - 69

Penilai: Tanggal

F. Penutup

Model pembelajaran portofolio dapat digunakan untuk mengembangkan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Dengan kata lain, penggunaan model pembelajaran portofolio dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi kebermaknaan peserta didik, baik berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, terutama pembinaan tatanan nilai, yaitu kepemimpinan diri pada peserta didik. Model ini sangat potensial dalam meningkatkan motivasi atau semangat belajar peserta didik, dengan tujuan menjadi *A Good Young Citizenship* yang berkualitas sebagai warga negara yang cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab.

Penggunaan model pembelajaran portofolio dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berimplikasi luas terhadap khasanah piranti profesional guru sebagai seorang fasilitator, *director-motivator*, mediator, rekonstruktor pembelajaran bagi siswa, dalam upaya mengembangkan dan membekali sejumlah keterampilan dan wawasan *life skill* kewarganegaraan siswa, yaitu: *civic life*, *civic skill*, *civic participation*, yang wajib dimiliki oleh setiap insan, agar peserta didik dapat hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Center for Indonesian Civic Education. 2002. *Praktik Belajar Kewarganegaraan: Kami Bangsa Indonesia*. Bandung: Proyek Kewarganegaraan Center for Indonesian Civic Education.
- Center for Indonesian Civic Education. 2003. *Praktik Belajar Kewarganegaraan: Kami Bangsa Indonesia, Buku Panduan Guru*. Edisi Kedua. Bandung: Proyek Kewarganegaraan Center for Indonesian Civic Education.
- Christin, Mezley Ninta. 2021. "Analisis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tradisi *Merdang-Merdem* Kecamatan Munte Kabupaten Karo". *Proposal Skripsi*. Medan: Jurusan PPKn FIS Unimed.
- Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Portofolio*, Bandung: Penerbit Genesindo.
- _____. 2009. *Inovasi Pembelajaran Project Citizen*, Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mangkoespoetra, Arier Achmad. 2005. Model Pembelajaran Portofolio: Sebuah Tinjauan Kritis. Dalam docstoc.com/docs/7837739/pend-kewarganegaraan, online, diakses 11 Februari 2010.
- Nurwardani, Paristiyanti, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Cetakan I*. Jakarta: Direktorat Jederal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI.

- Soehendro, Bambang. 2006. *Model Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs*. Jakarta: BNSP Departemen Pendidikan Nasional.
- Wahab, Abdul Aziz, dkk. 2007. *Pembaharuan dalam Pembelajaran PKn*. Edisi I. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Winataputra, Udin S. 2007. *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Edisi I. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yulia, Winda. 2020. "Implementasi Nilai Keadilan Sosial Pada Tradisi Sambatan Gawe Omah masyarakat suku jawa Di Desa Bulungihit Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara". *Skripsi*. Medan: Jurusan PPKn FIS Unimed.

GLOSARIUM

- Bangsa : Kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri
- Budaya : Segala hasil karya, karsa dan cipta manusia, yang berbentuk ide, artefak dan kegiatan manusia.
- Demokrasi : Bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat atau gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara
- Global : Bersangkut paut, mengenai, meliputi seluruh dunia.
- Gotong Royong : Bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu)
- Kearifan Lokal : Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal, bisa berupa tradisi, pepatah, dan semboyan hidup.
- Kedaerahan : Sifat-sifat atau segala sesuatu mengenai daerah.
- Kewarganegaraan : Hal yang berhubungan dengan warga negara; keanggotaan sebagai warga negara dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

- Lokal : Suatu tempat (tentang pembuatan, produksi, tumbuh, hidup, dan sebagainya); setempat
- Nilai : Sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, atau sesuatu yang menyempurkan manusia sesuai dengan hakikatnya
- Pembelajaran : proses, cara, perbuatan menjadikan belajar. Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- Pendidikan : Proses, cara, perbuatan mendidik, proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan kata lain, pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.
- Toleransi : Suatu perilaku atau sikap manusia yang "tidak menyimpang dari hukum berlaku" disuatu negara, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu

INDEKS

B

Bangsa, 20, 33, 36, 44, 54, 125
Budaya, 21, 33, 34, 54

C

Citizen, vi, ix, 20, 85, 86, 87,
88, 89, 108, 109, 110, 113,
125
Civic, 1, 2, 4, 12, 13, 16, 18, 33,
34, 35, 82, 86, 89, 125

D

Daerah, 82, 97, 110
Demokrasi, 21, 35

E

Era, v, ix, 9

G

Global, v, vii, ix, 5, 9, 23, 35, 39
Guru, 33, 53, 54, 60, 61, 62,
69, 70, 71, 72, 73, 76, 77,
78, 90, 125

H

Hukum, 21, 96

I

Indonesia, v, 1, 2, 10, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 28, 33, 35,
36, 37, 38, 42, 43, 44, 51,
54, 57, 65, 67, 75, 77, 79,
80, 81, 83, 86, 113, 125

K

Kearifan, v, vi, vii, ix, 23, 24,
25, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
44, 49, 52, 54, 58, 59, 62,
67, 80, 81, 82, 83, 108, 110,
111, 112
Kesatuan, 20
Kewarganegaraan, v, vii, ix, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 18, 20, 22, 23, 29, 30,
32, 33, 35, 36, 56, 73, 80,
81, 82, 85, 86, 93, 99, 106,
113, 124, 125, 126
Konstitusi, 21

L

Lokal, v, vi, vii, ix, 23, 33, 34,
35, 36, 39, 42, 43, 44, 49,
54, 58, 62, 67, 80, 81, 82,
83, 108, 110, 111, 112

M

Mental, v, ix, 39, 81

N

Nasional, 22, 34, 35, 57, 67,
79, 80, 81, 82, 83, 86, 126
Negara, 20, 21, 36, 80, 86
Nilai, vii, ix, 24, 32, 34, 36, 41,
54, 76, 125, 126

P

Pembelajaran, vi, ix, 7, 12, 35,
36, 44, 54, 62, 65, 67, 68,
69, 73, 74, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 125, 126
Pendidikan, v, vii, ix, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 20,
22, 23, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 39, 44, 49, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 67, 73,
79, 80, 81, 82, 83, 85, 86,
93, 99, 106, 113, 124, 125,
126

Persatuan, 20, 76, 81
PKn, ix, 23, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 80, 83, 85, 89, 90,
91, 126
Politik, 21, 22
PPKn, ix, 35, 44, 65, 73, 75,
125, 126
Praktik, vi, 31, 32, 113, 125
Publik, 110, 113

S

Sekolah, 35, 53, 54, 73, 81, 125
Siswa, 71, 72, 76, 81, 83
Sosial, 44, 82, 126

W

Warga, 21, 36

TENTANG PENULIS

Dr. Deny Setiawan, M.Si



Deny lahir di Bandung, 08 Maret 1968, Dosen tetap di Jurusan PPKn FIS UNIMED, pendidikan S1 (Sarjana) diraih dari IKIP Bandung jurusan PMP-Kn tahun 1992, pendidikan S2 (Magister) diraih dari Universitas Gadjah Mada jurusan Ketahanan Nasional tahun 1998, pendidikan S3 (Doktor) diraih dari Universitas

Pendidikan Indonesia bidang studi Pendidikan IPS tahun 2011, saat ini sebagai Lektor Kepala/IV b, Pembina Tingkat 1, Ketua Gugus Penjaminan Mutu FIS UNIMED, Asesor Nasional Sertifikasi Dosen DIKTI, Evaluator Nasional Sistem Informasi Layanan Perizinan Kelembagaan PT (SILEMKERMA DIKTI), Asesor Nasional, Lembaga Akreditasi Mandiri-Pendidikan (LAM-DIK), Tim Ahli LLDIKTI, kontak person: 082277255267, email: denysetiawan1978@gmail.com

Jamaludin., S.Pd., M.Pd.



Jamaludin, lahir di Bengkalis, Jumat, 19 Februari 1988, Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, meraih gelar S1 PPKn dari Universitas Riau dan S2 PKn dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dosen tetap di Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dan

mengajar di beberapa kampus swasta di kota medan, terlibat aktif dalam penulisan buku dan penelitian tentang pendidikan dan ilmu sosial, serta berpartisipasi sebagai

narasumber dan moderator di beberapa diskusi public.
Kontak person: 082333303311, email: jamaludin@unimed.ac.id

Fazli Rachman., S.Pd., M.Pd



Fazli lahir di Pangkalan Berandan, 8 September 1994, Dosen Asisten Ahli di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, pendidikan S1 (sarjana) diraih dari Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan S2 (magister) diraih dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, terlibat aktif dalam penulisan buku, publikasi ilmiah, agenda penelitian, pengabdian masyarakat serta berbagai kegiatan dan narasumber, kontak person: 085261810714, email: fazli.rachman@gmail.com

Drs. Halking, M.Si.



Halking lahir di Sumbawa, 6 April 1963, dosen tetap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, pendidikan S1 (Sarjana) diraih dari Universitas Airlangga jurusan Ilmu Politik, pendidikan S2 (magister) diraih dari Uinversitas Airlangga jurusan Ilmu-Ilmu Sosial (Minat Studi Sosiologi dan Politik), terlibat aktif dalam penulisan buku, agenda penelitian, pengabdian masyarakat serta berbagai kegiatan dan narasumber, kontak person: 085275200140, email: halking123@unimed.ac.id



Buku ini sebenarnya ingin menceritakan dan memberikan pemahaman kepada para pembaca terkhusus kepada pelajar atau mahasiswa bahwa pendidikan kewarganegaraan yang mampu bersaing, tetap eksis dan memiliki nilai tambah di tengah pusaran global adalah pendidikan kewarganegaraan yang masih mempertahankan, memanfaatkan dan memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri. Kearifan lokal bukan berarti sederhana, terbelakang atau ketinggalan zaman, namun dengan pengelolaan dan manajemen yang matang ia akan mampu mewarnai dan menyemai nilai-nilai kemajuan, bahkan bisa menopang peradaban itu sendiri.

Nilai-nilai kearifan lokal adalah sebuah identitas dan jati diri bangsa yang selanjutnya dapat menjadi pondasi berkemanusiaan, berkeilmuan dan pembangunan yang merupakan titik episentrum bagi tonggak peradaban secara universal. Nilai-nilai gotong royong, keramah-tamahan, tenggang rasa, kesederajatan, persaudaraan, silaturahmi, kebersamaan, toleransi, saling menghormati, adalah modal pembelajaran kewarganegaraan yang mungkin tidak dimiliki oleh semua bangsa, untuk selanjutnya dapat dibangun sebagai motor penggerak peradaban dalam berkehidupan di era post-industrial saat ini.

Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal Perspektif Global merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tim penulis dengan mencakup beberapa kajian: Bab I. PKn dan Pentingnya Kearifan Lokal di Era Global; Bab II. Kearifan Lokal Membangun Mental Global; Bab III. Desain Pembelajaran PKn Berorientasi Kearifan Lokal; Bab IV. Project Citizen Dengan Memanfaatkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL BERWAWASAN GLOBAL



CV. Format Publishing
Kompleks Griya Sei Rotan Syakinah Blok D5
Jalan Sugeng, Dusun IX Desa Sei Rotan,
Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara
Telp: 082160827215, Website: formatpublishing.id

BUKU PENDIDIKAN

ISBN 978-602-7543-86-7



ISBN 978-602-7543-87-4 (PDF)



Harga P. Jawa Rp. 95.000